



Lampiran : PERATURAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 05 Tahun 2019
TANGGAL : 27 Agustus 2019



DOKUMEN

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) Tahun.2019-2023

**NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR**

1. Menyemarakkan syariat islam dalam kehidupan masyarakat Nagari berdasarkan Al'quran dan sunnah.
2. Membudayakan kehidupan ABS-SBK (Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah) dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
4. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat Nagari
5. Mewujudkan Pemerintah Nagari yang mandiri.
6. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) Tahun 2019-2023 di Nagari Pulau Rajo Inderapura. Penyusun Revisi RPJM Nagari ini mengharapkan dapat memberikan masukan dalam Rangka Perencanaan Mengenai Revisi Pembangunan Jangka Menengah Nagari di Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Ucapan terima kasih sebesar besarnya juga disampaikan atas dukungan semua pihak sehingga tersusunnya Rancangan ini dan Tim Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam laporan ini. Karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat dihargai. Semoga Kegiatan yang dikerjakan ini memberikan manfaat yang nyata bagi Nagari Pulau Rajo Inderapura di masa yang akan datang.

Pulau Rajo, 27 Agustus 2019

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukuman	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.3.1 Maksud	
1.3.2 Tujuan	
1.4 Manfaat	
BAB II. PROFIL NAGARI	
2.1 Sejarah Nagari	
2.2 Petadan Kondisi Nagari	
2.3 Kelembagaan Nagari	
2.4 Dinamika Konflik	
2.5 Masalah dan Potensi	
2.5.1 Masalah	
2.5.2 Potensi	
BAB III. PROSES PENYUSUNAN REVISI RPJM NAGARI	
3.1 Pengkajian Nagari	
3.2 Musyawarah Nagari Revisi RPJM Nagari	
BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (LIMA TAHUN)	
4.1 Visi Nagari	
4.2 Misi Nagari	
4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari	
BAB V. PENUTUP	
Lampiran :	
1. Peta Sosial Nagari	
2. Tabel (Matrik) Program Kegiatan Lima Tahun	
3. Kalender musim	
4. Pernag Revisi RPJM	
5. SK Tim Penyusunan Revisi RPJM Nagari	
6. Berita Acara dan Daftar Hadir	



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Penduduk Menurut Umur
2. Tabel 2.2	Penduduk Menurut tingkat pendidikan
3. Tabel 2.3	penduduk menurut jenis pekerjaan
4. Tabel 2.4	penduduk menurut indikator pendidikan
5. Tabel 2.5	penduduk menurut kesejahteraan sosial
6. Tabel 2.6	penduduk menurut agama
7. Tabel 2.7	prasarana ekonomi
8. Tabel 2.8	Daftar Masalah dan Potensi
9. Tabel 3.9	Peta Sosial Nagari
10. Tabel 3.10	Pengkajian Nagari Menggunakan Sketsa Nagari
11. Tabel 3.11	Kalender Musim
12. Tabel 3.12	Masalah dan Potensi Pengkajian Nagari Menggunakan Kalender Musim
13. Tabel 3.13	Masalah dan Potensi Pengkajian Menggunakan Diagram Venn
14. Tabel 3.14	Pengelompokan Masalah
15. Tabel 4.15	Sinkronisasi Misi RPJM Kabupaten dengan RPJM Nagari



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 47 tahun 2015).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Pemerintah Nagari dalam menyelenggaraan urusan pembangunan nagari perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nagari yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nagari guna menghasilkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif



Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan nagari. Mengikutsertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Nagari. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di nagari. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari tersaji dalam dokumen Revisi RPJMNag ini. Perencanaan pembangunan nagari diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah nagari membentuk



Peraturan Nagari, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2. LANDASAN HUKUM RPJMNag:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)



sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari dan Perubahan SOTK 91 Tahun 2018
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya Revisi RPJMNag Pulau Rajo Inderapura sebagai dasar dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan dokumen ini, dimaksudkan agar dapat menjadikan dasar dan pedoman penyelenggara pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Pulau Rajo Inderapura berdasarkan masalah dan potensi serta arah kebijakan dalam pembangunan di Nagari.



1.3.2 Tujuan

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari
2. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
3. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan nagari.
4. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat di nagari dalam proses pembangunan.

1.4. Manfaat

Manfaat dari sebuah dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ini adalah sebagai pedoman dan acuan kerja Pemerintah untuk pencapaian Visi dan Misi Wali Nagari 5 (lima) Tahun kedepan. Sehingga nampak arah dan tujuan Pembangunan serta Kebijakam Pembangunan Pemerintah Nagari selama 5 (lima) Tahun Pemerintahan berjalan. sehingganya Masyarakat mengetahui seluruh program yang direncanakan oleh Wali Nagari, dan target yang dicapai sesuai dengan prioritas atau sesuai dengan janji politik sewaktu mencalonkan diri.



BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Sejarah Nagari Pulau Rajo Inderapura adalah berasal dari pemekaran nagari induk yakni Nagari Muara Sakai Inderapura. Pada tahun 2011 dimasa Pemerintahan Wali Nagari Bapak Junaidi, Nagari Pulau Rajo Inderapura terdiri dari 2 kampung dibawah satu kerapatan Adat Nagari yaitu :

1. Kampung Batang Tindih
2. Kampung Air Pilah (Air Uba)
(Pasir Ganting)

Kemudian untuk pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berakhir pada tahun 1983 dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Maka pada tanggal 1 Juli 1983 dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor: SK-162/GSB/1983, maka mulai tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintahan Nagari dihapuskan dan dibentuk Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dengan demikian Kampung berubah statusnya menjadi desa dari Tahun 2011 sampai sekarang yaitu;

1. Desa Pulau Rajo Inderapura

Desa Pulau Rajo Inderapura sebagai Penjabat Kepala Desa yang Pertama yaitu Bapak **Junaidi**. Desa Pulau Rajo Inderapura sebagai Penjabat Kepala Dusun saat itu yaitu **By. Jek**, dan **Andriadi** dibentuk Sebanyak 2 (dua) kampung seperti:

1. Kampung Batang tindih (Pasir Ganting)
2. Kampung Air Pilah (Air Uba)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peisisr Selatan Nomor : 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Rajo



Inderapura Kecamatan Airpura dipimpin Langsung dari Pegawai Camat (PNS) sebagai Penjabat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura yaitu “ **Iswandi**. Dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Urusan yakni ; 1. Kepala Urusan Pemerintahan (**Damra**), dan Kepala Urusan Kemasyarakatan (**Putri Melli**). dan 2 (dua) orang Kepala Kampung. Saudara **By. Jek** Kepala Kampung Batang tindih (Pasir Ganting) dan Air Pilah (Air Uba) **Andriadi**

Pada masa Penjabat Wali Nagari terbentuk Badan Permusyawaratan Nagari yang disingkat “BAMUSNag” yang terdiri dari 5 (lima) orang dari 5 (lima) Unsur diketahui oleh **Maradis, MBac** dari unsur Cadiak pandai, wakil ketua **Busral** dari unsur Ulama, Sekretaris **Tesnel.H** dari unsur Bundo kanduang, Anggota **Mardiwinta** dari unsur Generasi muda, dan **Rky. Rahim** dari unsur Ninik mamak. Dengan kerja sama Pemerintahan Nagari dengan masyarakat secara aman, damai dan lancar lahirlah Wali Nagari Defenitif yaitu “ **JUNAIDI**” Seorang tokoh Masyarakat yang kreatif. Pada bulan Desember 2017 habis masa jabatan wali nagari “ **Junaidi**” kembali Nagari Pulau Rajo Inderapuradijabat oleh Pegawai negeri sipil dari kecamatan yaitu “ **Penjabat Wali Nagari** Pulau Rajo Inderapura **Burhanuddin, SE** “. Dalam masa tugas Penjabat wali nagari Pulau Rajo Inderapura terbentuk Bamus nagari dari 5 unsur yaitu : Unsur Cadiak Pandai (Bustamar Effendi), unsur Ulama (Oga Sukri, S.Sos.I), unsur Ninik mamak (Yuliarman), unsur Generasi muda (Amzan), dan unsur bundo kanduang (Depi Sutri). Tugas Utama dari Bamus membentuk pilwana untuk Wali Nagari devenitif. Pada tanggal 16 Desember 2016 terpilihlah Wali Nagari Pulau Rajo Inderapuradevenitif “ **SALFARUDDIN.Spd** ” dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2017.

2.2 PETA DAN KONDISI NAGARI

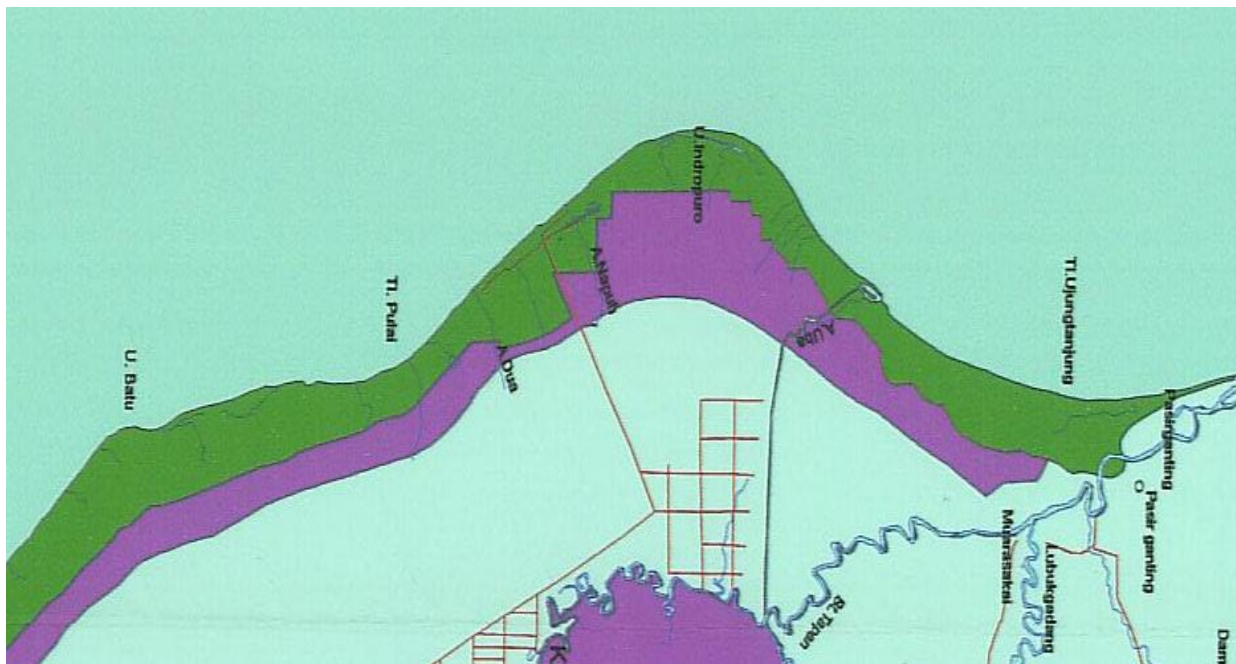
Nagari Pulau Rajo Inderapura adalah merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Ibukota nagari terletak di Tanah Bakali, Jarak dari kecamatan 21,5 km, dari Kabupaten 126 Km, dari Propinsi 175 Km, dari



ibu kota negara 1.612 Km. Bentangan geografis Nagari Pulau Rajo Inderapura dapat dilihat dari gambar 1 berikut. Daerah yang diarsir merupakan wilayah Nagari Pulau Rajo Inderapura.

PETA DAN KONDISI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

Gambar 1. Peta Nagari Pulau Rajo Inderapura



2.2.1 Demografi

Nagari Pulau Rajo Inderapuramerupakan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah lebih kurang 5.121 Ha. Jumlah penduduk Nagari Pulau Rajo Inderapurayang berjumlah 1.246 terdiri dari laki-laki 672 orang dan perempuan 574 orang.

Tabel II.1. Penduduk Nagari Pulau Rajo Inderapuramenurut umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK
0 - 6 Tahun	180 Orang



7- 12 Tahun	188Orang
13 -15 Tahun	88 Orang
16-25 Tahun	399 Orang
26 -54 Tahun	330 Orang
55 Tahun Keatas	61 Orang
JUMLAH	1.246Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2018

Merujuk kepada Profil Nagari Pulau Rajo Inderapura, 2.07 % warga merupakan tamatan perguruan tinggi.0.62 % merupakan Tamatan akademi.15.69 % merupakan tamatan SLTA Sederajat. 19.42% merupakan tamatan SLTP/Sederajat. 37.95 % merupakan tamatan SD/Sederajat. Sisanya 24.24 % belum tamat SD/Tidak Tamat SD.

Tabel II.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tamat PT	25 Orang
Tamat Akademi	8 Orang
Tamat SLTA	225 Orang
Tamat SLTP	279 Orang
Tamat SD	328 Orang
Belum Tamat SD/Tidak Tamat SD	231 Orang
Tidak Sekolah	150 Orang
JUMLAH	1.246 Orang



Sumber Data Profil Nagari Tahun 2018

Tabel II.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Buruh tani	30 Orang
Buruh bangunan	8Orang
Petani	95 Orang
Peternak	35 Orang
Pedagang	19 Orang
Tukang kayu	20orang
Tukang batu	0 Orang
Penjahit	5 Orang
Pengrajin	0 Orang
Perangkat desa/nagari	17Orang
Industri kecil	0 Orang
Pengangkutan	0 Orang
Pegawai negeri sipil	2 Orang
TNI/POLRI/	1 Orang
Pensiunan	0 Orang
Nelayan	241 Orang
Pengolahan Ikan Kering	49 Orang
Supir	1 Orang



Karyawan Swasta	11 Orang
Lain-lain	730 Orang
JUMLAH	1.246 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2018

a. Keadaan fisik/Geografis Nagari

Batas Wilayah Nagari Pulau Rajo Inderapura

- Sebelah Utara : Nagari Air haji LSB
- Sebelah Selatan : Semungu Silaut
- Sebelah Barat : Bebatasan dengan Laut
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai

b. Luas wilayah Nagari Pulau Rajo Inderapura

- Luas wilayah : 5.121. ha
 - i. Luas sawah : 120. ha
 - ii. Luas perkarangan : 1.000. ha
 - iii. Luas tegalan : ha
 - iv. Luas Perkebunan : 100. ha
 - v. Tanah Kosong : 3.901 ha

c. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Pulau Rajo Inderapura adalah merupakan dataran Rendah.

d. Iklim

Iklim dinagari Pulau Rajo Inderapura sebagaimana Nagari lain diwilayah Indonesia mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh



langsung terhadap pola tanam dan Pengolahan Ikan dinagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari meliputi 2 (dua) Kampung dikenagarian Pulau Rajo Inderapura yaitu Kampung Batang Tindih (Pasir Ganting) dan Kampung Air Pilah (Air Uba).

2.2.2 Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat NagariPulau Rajo Inderapurabersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan.Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;Aspek sosial budaya mencakup Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga.

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.4 Penduduk Menurut Indikator Pendidikan

INDIKATOR PENDIDIKAN	JUMLAH
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI	
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs	



Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA	
Rasio guru/ murid TK/PAUD	3/45
Rasio guru/ murid SD	11/151
Rasio guru/ murid SLTP	16/63
Rasio guru/ murid SLTA	
Jumlah TK/PAUD	1
Jumlah SD	1
Jumlah SLTP	1
Jumlah SLTA	
Angka melek buta huruf	2
JUMLAH	294

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

b. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pada aspek Kesejahteraan Sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel II.5 Penduduk Menurut Kesejahteraan Sosial

PENYANDANG MASALAH	JUMLAH
Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar	Orang
Tuna susila	Orang



Tuna Netra	Orang
Bisu/ Tuli	1Orang
Yatim Piatu dan Anak Terlantar	1Orang
Orang jompo	67 Orang
Keluarga pra sejahtera	132 Keluarga
Keluarga sejahtera I	70 Keluarga
Keluarga sejahtera II	58 Keluarga
Keluarga sejahtera III	7 Keluarga
Keluarga sejahtera III +	Keluarga
JUMLAH	336 Keluarga

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2018

c. Aspek Kesehatan

Pada Aspek Kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Angka kematian bayi 1 orang dari jumlah bayi hidup 180 orang pada tahun 2018.
2. Angka harapan hidup 1.246 tahun 2018
3. Angka kematian ibu melahirkan 1 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 32 orang.
4. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0,02 %
5. Jumlah posyandu 2 (yandu Balita)
6. Jumlah Bidan Desa 2 orang
7. Jumlah jamban 267 dari kepala keluarga berjumlah 267 KK

d. Aspek Agama



Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, seratus Persen penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.6 Penduduk Menurut Agama

AGAMA	JUMLAH
Islam	1.246
Kristen	-
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-
JUMLAH	1.246

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2018

Prasarana Keagamaan meliputi Masjid dan Mushala/Surau, di Kampung Batang Tindih (Pasir Ganting) ada 1 buah Masjid dan 1 buah Mushallah/surau, di Kampung Air Pilah (Air Uba) ada 1 buah Masjid dan 0 buah Mushallah/surau.

e. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Desa Batang Tindih (Pasir Ganting) di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ Prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :



1. Lapangan Tennis Meja : 0 tempat
2. Lapangan Bulu Tangkis : 0 tempat
3. Lapangan Sepak Bola : 1 tempat
4. Lapangan Volly Ball : 1 tempat

f. Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di Nagari ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Seni Budaya, Randai, Bicara Adat/Basitinah Kato, dan lain-lain

2.2.3 Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomian Nagari dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, yaitu:

Tabel II.7 Prasarana Ekonomi

PRASARANA EKONOMI	JUMLAH
Toko/ Kios	1
Warung	62
Lumbung Nagari	-
Mobil pick kup	7
Truk/ col	3
Mobil Travel	3
JUMLAH	76

Sumber Data Profil nagari Tahun 2018

Sementara untuk perkembangan Usaha Ekonomi Nagari sebagai berikut :



1. Peningkatan kemampuan pengrajin kecil
2. Penyaluran modal usaha
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian Nagari

2.3 KELEMBAGAANNAGARI

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

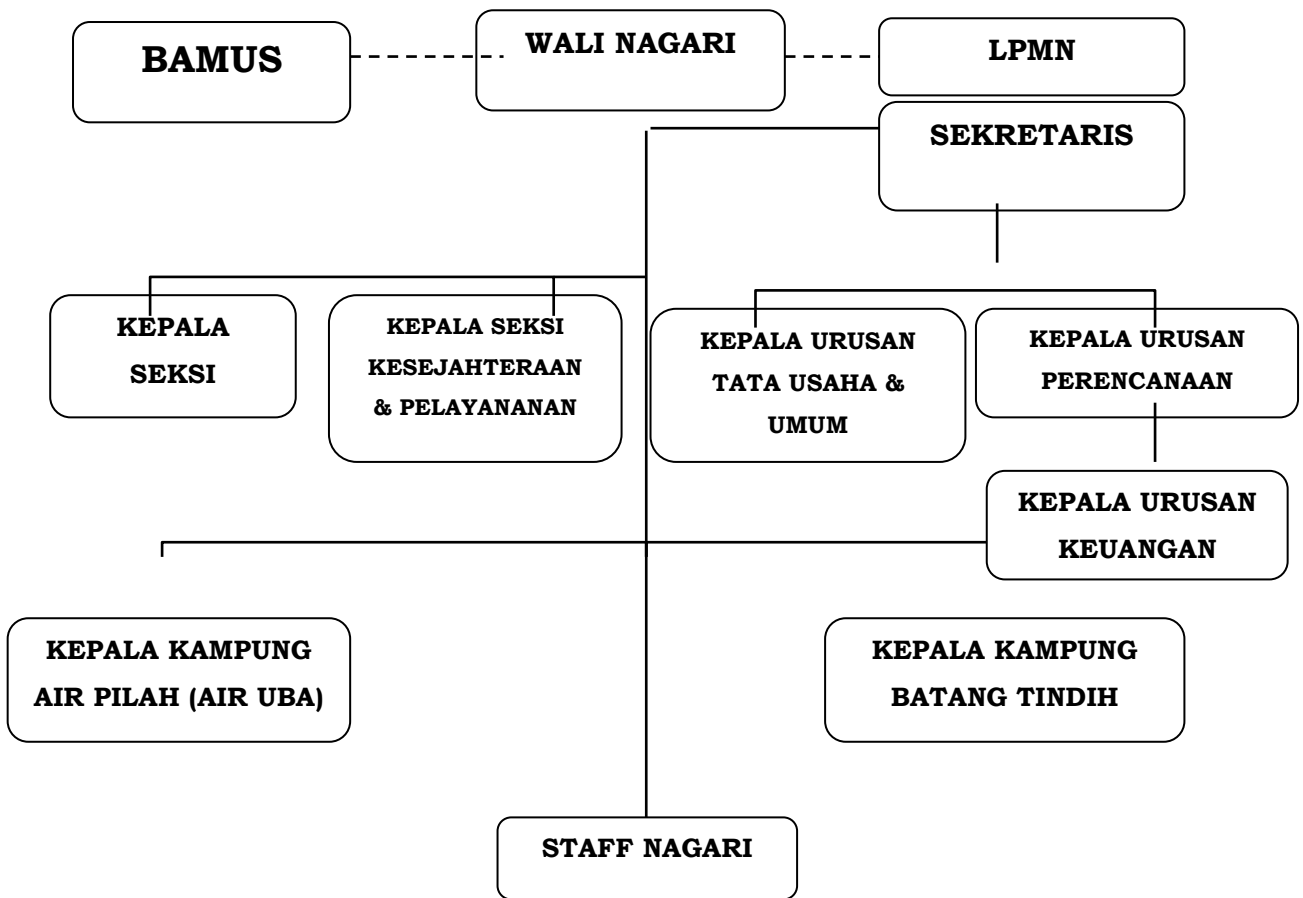


2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS
2. Pemerintah Nagari terdiri dari WaliNagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 3 (Tiga) Kepala Urusan, 2 (dua) orang Staf, dan 2 (dua) Kepala Kampung. Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS.
3. Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Nagari, Kasi, Kepala Urusan, Staf, dan Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari
6. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Wali Nagari dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada



2.3.2.1. STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURATAHUN 2018



Gambar 6.Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Pulau Rajo Inderapura.

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 64 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI



2.3.2.1 Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

NO	N A M A	J A B A T A N
1	OGA SUKRI,S.Sos.I	Ketua
2	AMZAN	Wakil Ketua
3	DEPI SUTRI	Sekretaris
4	BUSTAMAR EFFENDI	Anggota
5	YULIARMAN	Anggota
6	INJES PUTRI YENI	Staff

2.3.2.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : Deli indra
- II. Wakil Ketua : Siarman
: Anwar
- IV. Sekretaris : Rila Odian
- V. Bendahara : Eva Diana
- VI. Seksi-seksi
 1. Seksi Pembinaan Agama : Junaidi
 - Anggota : Ali Martopo,S.pd.I
 - Anggota : Erna Yanti
 - Anggota : Mardiwinta
 2. Seksi Pembinaan Adat : Adi Dedi Darmayadi
 - Anggota : Igus
 - Anggota : Jalina
 - Anggota : Ermi
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan :Nanang
 - Anggota Gusmairah,Spd



- Anggota : Mardepi
- 4. Seksi Pembinaan K-3 dan Lingkungan Hidup : Neneng Pitri Dona, S.pd
 - Anggota : Mardanis
 - Anggota : Darni
 - Anggota : Ella Otmala Sari
- 5. Seksi Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana : Ika Marleni
 - Anggota : Tuti Emilia, Amd Keb
 - Anggota : Ripoldi Indra Amd. Keb
- 6. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian : Kader Yandu
 - Anggota : Rodi
 - Anggota : Denies Franzaldi
- 7. Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi : Sandra
 - Anggota : Oyon Dalmatias
 - Anggota : Remon Dia Putra
- 8. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana : Syafri/On
 - Anggota : Syafril
 - Anggota : Syafrizal
 - Anggota : Muslimin
- 9. Keamanan dan Ketertiban : Walkadri
 - Anggota : Agung Pradana
 - Anggota : Iril
 - Anggota : Ogi Pandra
- 10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Agus wandi
 - Anggota : Rahma, S.Pd
 - Anggota : Idal
 - Anggota : Yarni
 - : Sida



2.3.2.3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : Rahma, S.Pd
- II. Wakil Ketua 1: Idal
- III. Wakil Ketua 2: Yarni
- IV. Sekretaris : Desmurni
- V. Bendahara : Harmadona,A.Md
- VI. Kelompok Kerja I (Pokja I)
 - Ketua : Mardepi
 - Sekretaris : Ramadani
 - Anggota : 1. Jalina
 - 2. Harmaini
- VII. Kelompok Kerja II (Pokja II)
 - Ketua : Mardanis
 - Sekretaris : Fitmawati
 - Anggota : 1. Marwati
 - 2. Sida
 - 3. Anita Zahara
- VIII. Kelompok Kerja III (Pokja III)
 - Ketua : Eli Susanti
 - Sekretaris : Idel Mawati
 - Anggota : 1. Nurdepi
 - 2. Saedar Siti
 - 3. Isesnawati
- IX. Kelompok Pokja IV (Pokja IV)
 - Ketua : Tuti Emilia,Amd.Keb
 - Sekretaris : Mardepi
 - Anggota : 1. Eva Diana
 - 2. Itesni
 - 3. Yeni Deflia



2.4 DINAMIKA KONFLIK

Dikenagarian Pulau Rajo Inderapura yang selama ini Masalah Konflik jarang sekali terjadi atau tidak ada terjadi selama Nagari Pulau Rajo Inderapura berdiri. Adapun permasalahan yang terjadi hanya kenakalan-kenakalan remaja, permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ditingkat Nagari dengan melibatkan unsur mamak suku, ketua pemuda dan Babinkhamtibmas serta Babinsa. Permasalahan juga ada timbul dari batas sepadan tanah, permasalahan ini juga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ditingkat Nagari dengan melibatkan unsur Ninik mamak, mamak suku, Kerapatan Adat Nagari, Babinkhamtibmas, dan Babinsa. Organisasi/kelompok termasuk Lembaga LPMN, BAMUS yang ada dikenagarian Pulau Rajo Inderapuracukup berperan aktif sebagai mitra dalam mewujudkan pembangunan dinagari baik fisik maupun non fisik dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Nagari untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan Motto Nagari

***“ SABULEK SAIYO UNTUK MENUJU NAGARI PULAU RAJO
INDERAPURA SEJAHTERA DIKABUPATEN PESISIR SELATAN”***

2.5 MASALAH DAN POTENSI

2.5.1 MASALAH

A. Masalah Pendidikan/Sumber Daya Manusia

- ☞ Rumah Dinas guru tidak ada
- ☞ Mutu pendidikan sedang
- ☞ Perlunya sekolah kejuruan
- ☞ Biaya sekolah mahal
- ☞ Buku-buku mahal
- ☞ Perpustakaan belum ada



- ☞ Belum tertibnya jam belajar
- ☞ Sarana pendidikan belum memadai
- ☞ Masih minimnya keterampilan/keahlian masyarakat
- ☞ Tidak lengkapnya peralatan siswa
- ☞ Tidak adanya pendidikan ekstrakurikuler
- ☞ Tidak adanya biaya anak

B. Kesehatan

- ☞ Belum optimalnya perhatian Pemerintah
- ☞ Mck belum ada
- ☞ Bidan desa kurang dalam kebersihan
- ☞ Obat-obatan mahal
- ☞ Sarana kesehatan belum optimal
- ☞ Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti kesehatan
- ☞ Ambulan Nagari tidak ada
- ☞ Jamkesmas dan jamkesda sangat kurang
- ☞ Belum terlaksananya pangar rumah sakit yang secara menyeluruh

C. Sarana dan Prasarana

- ☞ Belum adanya tribun mini sepak bola
- ☞ Banyaknya jalan yang belum dibangun
- ☞ Ada sejumlah kampung yang belum ada jaringan listrik
- ☞ Kurangnya sarana umum
- ☞ Perlu pengembangan pemukiman
- ☞ Jalan masih tanah dan berlobang
- ☞ Lapangan olah raga tidak memadai
- ☞ Belum terlaksananya penerangan gedung shalter
- ☞ Belum adanya gapura masuk dan tampal batas nagari
- ☞ Belum siapnya pangar kantor wali
- ☞ Belum terlaksananya parit miring pengeringan kampung sedangkan masyarakat banyak
- ☞ Terkendalanya masyarakat saat menyebrang
- ☞ Susahnya roda dua dan empat saat beroperasi karena jln kurang memadai
- ☞ Terhambatnya petani saat mengeluarkan hasil panennya
- ☞ Kurang fasilitas pelayanan kesehatan
- ☞ Terganggunya kenyamanan pasien saat berobat



- ☞ Banyak lemparan dasar mengganggu ekonomi masyarakat setiap hari
- ☞ Ikan banyak membusuk
- ☞ Tanah kurang dimanfaatkan oleh masyarakat
- ☞ Jauhnya jarak tempuh masyarakat dalam evakuasi tsunami
- ☞ Tidak layak tempat pendidikan untuk anak usia dini dalam proses belajar-mengajar
- ☞ Keluar masuknya pendatang tidak tertib
- ☞ Pakumnya pemuda saat ronda
- ☞ Belum berdirinya pos pemuda

D. Sosial Budaya

- ☞ Kesulitan alat music tradisional dan pakaian adat
- ☞ Minimnya pengetahuan masyarakat tentang adat
- ☞ Peralatan olah raga kurang
- ☞ Luasnya wilayah pemerintahan nagari tidak seimbang dengan sarana umum yang ada.

E. Koperasi dan Usaha Masyarakat

- ☞ Minimnya pembinaan perkoperasian/ukm
- ☞ Minimnya peralatan untuk kerajinan dan perbengkelan
- ☞ Sulitnya UKM memperoleh modal usaha

F. Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- ☞ Sulitnya memperoleh bibit sawit bermutu
- ☞ Sulitnya memperoleh bibit palawija bermutu
- ☞ Sulitnya masyarakat peternak ayam dan sapi mengembangkan usahanya.
- ☞ Minimnya bibit ikan lele dan nila.
- ☞ Saluran irigasi tidak memadai
- ☞ Kurangnya modal pengadaan ternak
- ☞ Tepi pantai kurang bersih
- ☞ Tidak ada penyanggah mengatasi abrasi pantai
- ☞ Belum tersedianya kerambah ikan terapung
- ☞ Sungai dipenuhi enceng gondok
- ☞ Belum tersedianya tempat yang baik bagi pengunjung



- ☞ Belum adanya dana pembuatan tempat rekreasi pariwisata
- ☞ Tidak adanya alat pengolahan dan penyimpanan ikan
- ☞ Kurangnya semangat masyarakat untuk membudidayakan pohon klingking karena modal tidak ada

G. Penanggulangan Bencana

- ☞ Belum terbentuknya iktis bencana
- ☞ Belum terbentuknya dapur lima
- ☞ Belum adanya simulasi pembuatan tenda darurat
- ☞ Belum adanya bantuan logistik
- ☞ Belum tersedianya Bantuan Keadaan Mendesak

2.5.2 Potensi

A. Pendidikan/Sumber Daya Manusia

- ☞ Jumlah usia sekolah cukup banyak
- ☞ Tingginya minat anak-anak untuk sekolah di kejuruan
- ☞ Minat baca masyarakat sudah mulai muncul
- ☞ Semangat belajar siswa tinggi
- ☞ Banyaknya waktu bermain bagi anak dalam waktu pelajaran sekolah
- ☞ Lahan ada
- ☞ Banyaknya anak menuntut ilmu ke luar nagari

B. Kesehatan

- ☞ Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sudah mulai muncul
- ☞ Keberadaan bidan desa sudah mulai diterima oleh masyarakat
- ☞ Banyak masyarakat yang miskin
- ☞ Bidan ada
- ☞ Banyaknya masyarakat yang miskin
- ☞ Tanah dan swadaya ada
- ☞ Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggulangi narkoba
- ☞ Tingginya semangat ibu-ibu dalam senam sehat



C. Sarana dan Prasarana

- ☞ Hampir semua kampung mempunyai lapangan bola kaki
- ☞ Luasnya areal pertanian dan perkebunan masyarakat
- ☞ Jalan ada
- ☞ Koral ada
- ☞ Lapangan ada
- ☞ Gedung shalter ada
- ☞ Pembatasan wilayah ada
- ☞ Tanah kantor wali dan swadaya ada
- ☞ Tanah ada untuk pembangunan parit miring pengeringan rawa kamp.air pilah
- ☞ Swadaya pembangunan jembatan plat beker ada
- ☞ Bentuk jalan untuk melanjutkan pengerasan jln ada
- ☞ Badan jalan untuk pembangunan plat beton ada
- ☞ Bidan dan pembangunan ada
- ☞ Anak dan guru tk/paud ada
- ☞ Tanah dan swadaya pemuda ada
- ☞ Tanah masyarakat dan swadaya untuk pematangan lahan lokasi rumah tapak adat
- ☞ Tingginya semangat pemuda/I dalam segi olah raga
- ☞ Banyaknya masyarakat miskin di pinggir laut
- ☞ Banyaknya rumah tidak layak huni di pinggir laut
- ☞ Semangat ibu-ibu kurang dalam menjaga kesehatan
- ☞ Tingginya semangat ibu-ibu pengadaan MCK

D. Sosial Budaya

- ☞ Tingginya minat masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional
- ☞ Pranata agama, budaya/adat masih menjadi nilai dasar masyarakat
- ☞ Luasnya wilayah Pemerintahan Nagari
- ☞ Tingginya antusias masyarakat untuk melestarikan do'a Pasir/pantai
- ☞ Tingginya antusias masyarakat untuk melestarikan sanggar seni

E. Koperasi dan Usaha Masyarakat



- ☞ Jumlah koperasi dan ukm cukup banyak
- ☞ Jumlah kelompok simpan pinjam cukup banyak bermunculan
- ☞ Menjamurnya budaya arisan/julo-julo

F. Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- ☞ Jumlah kelompok tani cukup banyak
- ☞ Sulitnya memperoleh bibit palawija bermutu
- ☞ Luasnya lahan kebun sawit yang bisa ditumpangsarikan dengan peternakan ayam, kambing dan sapi.
- ☞ Tersedianya areal untuk budidaya ikan lele dan nila dan lain sebagainya.
- ☞ Sumber air ada
- ☞ Padang rumput ada
- ☞ Pantai ada
- ☞ Sungai ada
- ☞ Tempat rekreasi ada
- ☞ Ikan ada
- ☞ Lahan dan swadaya masyarakat untuk penanaman pohon keliling ada
- ☞ Adanya potensi bagi petani
- ☞ Adanya semangat para nelayan saat melaut
- ☞ Tinggi semangat masyarakat dalam mengatasi masalah pukut harimau
- ☞ Banyak pendapatan peningkatan ikan
- ☞ Banyak nya masyarakat ditepi laut
- ☞ Adanya tempat pembuatan TPI
- ☞ Banyaknya sampan di tepi pantai
- ☞ Banyaknya peminat ternak

H. Penanggulangan Bencana

- ☞ Tenaga sukarela ada
- ☞ Tempat ada
- ☞ Sumber dana ada ADD dan DD
- ☞ Laut dan Masyarakat Ada
- ☞ Potensi kewilayahan bencana ada



BAB III

PROSES PENYUSUNAN REVISI RPJM NAGARI

3.1 Pengkajian Nagari

a. Pengertian

Pengkajian keadaan Nagari adalah Proses Penggalan dan Pengumpulan Data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

1. Potensi Nagari
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan Masyarakat

c. Pendamping Desa

Kegiatan Pengkajian Nagari difasilitasi oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.

d. Pendekatan dan Metode

1. Penyelarasan Data Terbaru Nagari (lihat lampiran permendagri 114/2014)
2. Pengkajian Nagari dilakukan secara Partisipatif dengan menggunakan Metode Partipatory Rural Aprisal (PRA) melalui Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim.
3. Solusi dan Tindakan

e. Alat Kajian dan Instrumen



Alat kajian yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Lembaga. Instrumen yang digunakan adalah Form-form b (masukan) dan C (poses) sesuai lampiran Permendagri nomor 114 tahun 2014

f. Proses

1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali Potensi, masalah dan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas
2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
3. Memfasilitasi Masyarakat dimaksud melakukan pengkajian, tindakan, dan pemecahan masalah
4. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan tingkat peringkat tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kedaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Nagari yang bersangkutan

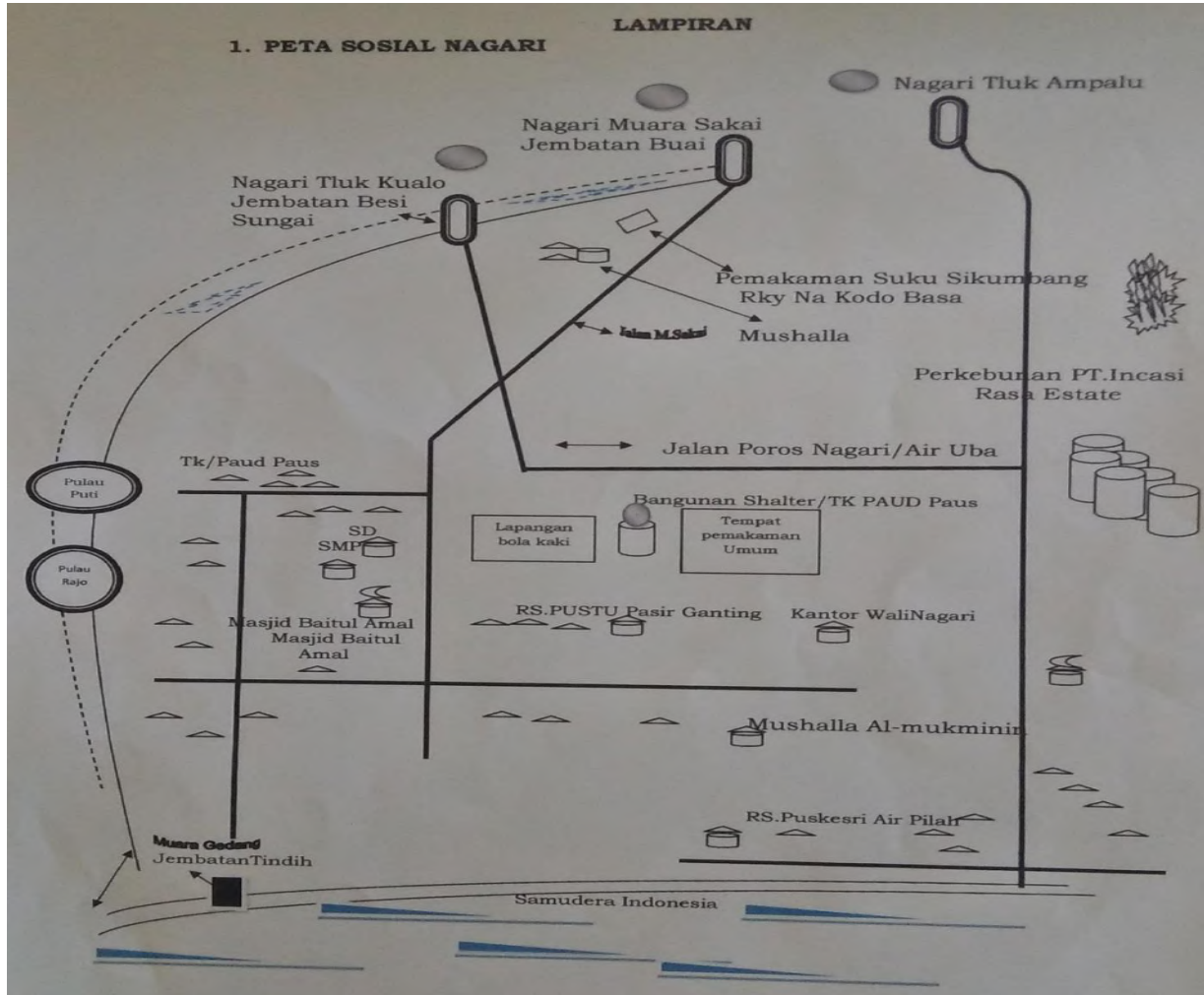
h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Data Potensi Nagari
2. Data Permasalahan
3. Data Kebutuhan/Peringkat tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri Nmor 114 tahun 2014

3.1.1. Pengkajian Nagari Menggunakan Sketsa Nagari

Gambar.2. Peta Sosial Nagari



Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari
Menggunakan Sketsa Nagari Kampung Batang Tindih (Pasir
Ganting)

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI
1	Batang tindih	1. <u>Bidang Pemerintahan</u>	
		1. Belum adanya pemeliharaan gedung	Kantor ada, tenaga



		kantor	ada
		2. Kurangnya sumberdaya manusia	Sumber daya manusia ada
		3. Kurangnya Pelatihan bagi kepala Kampung dan lembaga masyarakat	Sumber daya manusia ada
		4. Kurangnya Pasilitas Kantor	Perangkat Nagari ada
		5. Mobile Kantor Belum Lengkap	Perangkat Nagari ada
		6. Kurangnya Kesejahteraan Perangkat Nagari	Perangkat Nagari ada
		7. Kurangnya pelatihan bagi aparatur nagari	Lembaga ada
		8. Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Tenaga ada, jaringan ada
		9. Kurangnya media informasi	Lokasi ada
		10. Kurang jelasnya batas wilayah administrasi nagari	Lokasi ada, bahan ada
		11. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hari jadinya / berdirinnya Nagari	Kegiatan ada, masyarakat ada
		<u>BidangPelaksanaan</u> <u>Pembangunan Nagari</u> I. <u>Sub Bidang Pendidikan</u>	



1. Kurangnya kesejahteraan guru PAUD /TK/MDA	Guru ada, Bangunan ada, Murid Ada
2. Kurangnya biaya sekolah bagi anak keluarga miskin	Siswa miskin ada
3. Banyaknya anak-anak Kurang mampu untuk melanjutkan sekolah (Beasiswa)	Siswa miskin Berprestasi
4. Kurangnya mobiler SMP, SD, TK/PAUD, TPQ/MDTQ	Komite sekolah, Gedung ada, Murid Ada
5. Kurangnya ruangan TPA	Siswa dan guru ada /tanah ada
6. Tersedianya LABOR	Peralatan tidak ada
7. Ruang Belajar Kurang Memadai	Ruang Belajar SD ada
8. Kurang Tersedia Pustaka Sekolah	SD ada
9. Tidak Tersedianya Taman Bacaan Nagari (Pustaka Nagari)	Lahan Ada, Peminat Ada
10. Pagar Sekolah Tidak ada	SMP, SD dan Komite ada
11. WC Guru dan Murid SD Rusak tidak Bisa Digunakan	Lahan ada
12. Mushollah SD dan TK/PAUD SD dan TK/PAUD	Guru Ada, Murid



		Tidak Ada	Ada, Lahan Ada
		13. Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Guru Ada, Murid Ada
		14. APE TK/PAUD Kurang Memadai	Murid Ada. Lahan Ada
		15. Ruang Belajar SMP, SD Kurang	Lahan Ada, Murid Ada
		16. Loteng SD Rusak	Ruangan Ada, Murid Ada
		17. Gedung TK/PAUD, MDA/TPSA Belum Ada	Lahan Ada, Guru Ada
		18. Jalan Nagari Sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta Jembatan & Tanggul Belum Ada	Material Ada
		19. Pembangunan Gedung SD	Murid ada
		20. Pelatihan Kerajinan, Perbengkelan dan tata boga	Peserta ada
		21. Beasiswa pelajar SMP dan SD	Murid ada
		22. Pengadaan Bis Sekolah	Murid SMA ada
		23. Kendaraan dinas guru	Guru ada
		II. <u>Sub Bidang Kesehatan</u>	



1. Tidak ada pelayanan Kesehatan (POSKESRI) di Air Pilah	Lahan, Material, Tenaga Kesehatan ada
2. Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Lahan ada, RTM Ada
3. Tidak Tersedianya Air Bersih	Lahan Ada
4. Kurangnya Insentif Kader Yandu	Kader ada
5. Perlunya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	Kader Ada
6. Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Kader Ada
7. Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Tenaga Ada, Poskesri ada
8. Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu Hamil	Anak dan Ibu Hamil ada
9. Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Ibu Hamil dan RTM ada
10. Tidak Tersedianya AMBULANCE	Tenaga ada
11. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	RTM Banyak
12. Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	RTM Banyak
13. Pagar Poskesri Tidak Ada	Lahan Ada, Gedung Ada



14. Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Kader Ada, Lahan Ada
15. Kurang Layaknya Bangunan Poskesri	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada
16. Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Tenaga Ada
17. Pemeriksaan Lansia	Lansia ada
18. Penyuluhan Narkotika	Masyarakat ada
19. PMT	Anak ada
III. <u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	
1. Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Lahan ,Material ada
2. Tidak adanya Dranase dan Parit Miring	Lahan ,Material ada
3. Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Lahan ,Material ada
4. Tidak ada Jembatan Permanen Penghubung	Lahan ,Material ada
5. Kurangnya diminati Kegiatan Masyarakat di Malam Hari	Lahan Ada
6. Kurangnya Jaringan Irigasi	Lahan ,Material ada
7. Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke	Lokasi Ada



Tempat Evakuasi Tsunami	
8. Tidak Adanya Lapangan Olah Raga yang Permanen dll	Lahan Ada, Kelompok Ada
9. Kurangnya Jalan Lingkar Pemukiman Masyarakat	Lahan Ada, Material Ada
10. Kurangnya Jaringan Irigasi	Lahan Ada, Material Ada
11. Kurang Lancarnya Saluran Pembuang/Drenase	Lahan Ada, Material Ada
12. Tidak ada Pengaman Tebing	Lahan Ada, Material Ada
13. Kurangnya Akses Jalan Rumah Masyarakat	Tenaga Ada, lahan Ada
14. kurangnya Akses Jalan Usaha Tani dan Perkebunan	Lahan Ada, Tenaga Ada
15. Kurang Layaknya Poskeamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lahan Ada, Tenaga Ada
16. Sulitnya Menempuh Jalan Ke Pandam Kuburan	Lahan Ada
17. Belum adanya pagar TPU	Lahan ada
18. Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Lahan Ada, Pengunjung Ada
19. Kurangnya lapangan bola kaki	Tanah ada
20. Pembukaan jalan ke muara	Tanah ada



		21. Pembukaan muara baru	Tanah ada
		22. Pembukaan jalan penghubung pasir ganting ke air pilah	Tanah ada
		23. Tidak adanya tanggul pantai	Potensi ada
		24. Pembangunan jembatan	Tanah ada
		25. Pembukaan tempat pariwisata	Potensi ada
		26. Pengadaan dan pembangunan tempat pustaka	Lahan ada
		27. Pembangunan pagar	Lahan ada
		28. Pembangunan gedung paud dan SD	Lahan ada
		29. Pembangunan rumah panggung nelayan	Lahan ada
		IV. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
		1. Belum Tersedianya Bak Penampung Sampah Rumahan	Lahan Ada
		2. Banyaknya Masyarakat Kurang Mampu	RTLH Ada, Lahan Ada
		3. Kurang Tersedianya Air Bersih di Kawasan Agropolitan	Lahan Ada, RT Ada
		4. Kurang tersedianya Wahana Bermain Anak	Lahan Ada, anak-anak ada



		5. Menggenangnya Limbah Rumah Masyarakat	Lahan Ada
		6. Kurang Layaknya Air Kebutuhan Rumah Tangga	RTM Ada, Lahan Ada
		7. Tidak adanya lampu jalan	Lahan ada
		8. Pembangunan RTLH	RTM
		9. Pengadaan EWS	Potensi ada
		V. <u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	
		1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Lahan ada Material ada
		2. Belum adanya penghijauan pekarangan Rumah (SAO)	Lahan ada Material ada
		3. Kurangnya penghijauan tepi pantai	Lahan ada
		4. Kurangnya mesin giling pakan	Potensi ada
		5. Tidak adanya tong sampah	Lahan ada
		6. Tidak adanya PAMSIMAS	Lahan ada
		VI. <u>Sub Bidang Sosial dan Budaya</u>	
		1. Belum adaya alat kesenian	Potensi ada
		2. Penyuluhan dan perlengkapan adat dan sanggar seni	Masyarakat ada
		3. Perlengkapan pakaian acara adat dll	Masyarakat ada



4. Kurangnya peralatan	Potensi ada
VII. <u>Sub Pertanian</u>	
<u>Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</u>	
1. Kurangnya pembibitan pertanian dan perkebunan lengkap	Lahan dan petani ada
2. Kurangnya alat perlengkapan nelayan	Potensi dan masyarakat ada
3. Tidak adanya kapal pemburu kapal	Sasaran ada
4. Tidak adanya thermokking	Tempat ada
5. Kurangnya pembibitan ikan	Lahan ada
6. Kurangnya alat perlengkapan penjemuran nelayan	Tempat ada
VIII. <u>Penanggulangan Bencana</u>	
☞ Belum terbentuknya siaga bencana ☞ Belum terbentuknya dapur lima ☞ Belum adanya simulasi pembuatan tenda darurat ☞ Belum adanya bantuan logistik ☞ Belum tersedianya Bantuan Keadaan Mendesa	Tenaga sukarela ada 1. Tempat ada 2. Sumber dana ada ADD dan DD 3. Laut dan Masyarakat Ada 4. Potensi kewilayahan bencana ada



--	--	--	--

Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari
Menggunakan Sketsa Nagari Kampung Air Pilah (Air Uba)

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI
2	Air Pilah	1. <u>Bidang Pemerintahan</u>	
		1. Belum adanya pemeliharaan gedung kantor	Kantor ada, tenaga ada
		2. Kurangnya sumberdaya manusia	Sumber daya manusia ada
		3. Kurangnya Pelatihan bagi kepala Kampung dan lembaga masyarakat	Sumber daya manusia ada
		4. Kurangnya Pasilitas Kantor	Perangkat Nagari ada
		5. Mobile Kantor Belum Lengkap	Perangkat Nagari ada
		6. Kurangnya Kesejahteraan Perangkat Nagari	Perangkat Nagari ada
		7. Kurangnya pelatihan bagi aparatur nagari	Lembaga ada
		8. Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Tenaga ada, jaringan ada
		9. Kurangnya media informasi	Lokasi ada



		10. Kurang jelasnya batas wilayah administrasi nagari	Lokasi ada, bahan ada
		11. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hari jadinya / berdirinya Nagari	Kegiatan ada, masyarakat ada
		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>	
		<u>I. Sub Bidang Pendidikan</u>	
		1. Kurangnya kesejahteraan guru MDA	Guru ada, Bangunan ada, Murid Ada
		2. Kurangnya biaya sekolah bagi anak keluarga miskin	Siswa miskin ada
		3. Banyaknya anak-anak Kurang mampu untuk melanjutkan sekolah (Beasiswa)	Siswa miskin Berprestasi
		4. Tidak ada ruangan MDA	Siswa dan guru ada /tanah ada
		5. Ruang Belajar Kurang Memadai	Ruang Belajar SD ada
		6. Tidak Tersedianya Taman Bacaan Nagari (Pustaka Nagari)	Lahan Ada, Peminat Ada
		7. Mushollah SD dan TK/PAUD SD dan TK/PAUD Tidak Ada	Guru Ada, Murid Ada,



			Lahan Ada
		8. Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Guru Ada, Murid Ada
		9. Gedung TK/PAUD, MDA/TPSA Belum Ada	Lahan Ada, Guru Ada
		10. Jalan Nagari Sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta Jembatan & Tanggul Belum Ada	Material Ada
		II. <u>Sub Bidang Kesehatan</u>	
		20. Tidak ada pelayanan Kesehatan (POSKESRI)	Lahan, Material, Tenaga Kesehatan ada
		21. Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Lahan ada, RTM Ada
		22. Kurang Tersedianya Air Bersih	PDAM Ada, Lahan Ada
		23. Kurangnya Insentif Kader Yandu	Kader ada
		24. Perlunya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	Kader Ada
		25. Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Kader Ada
		26. Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Tenaga Ada, Poskesri ada



		27. Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu Hamil	Anak dan Ibu Hamil ada
		28. Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Ibu Hamil dan RTM ada
		29. Tidak Tersedianya AMBULANCE	Tenaga ada
		30. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	RTM Banyak
		31. Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	RTM Banyak
		32. Pagar Poskesri Tidak Ada	Lahan Ada, Gedung Ada
		33. Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Kader Ada, Lahan Ada
		34. Kurang Layaknya Bangunan Poskesri Timbulun	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada
		35. Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Tenaga Ada
		III. <u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	
		30. Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Lahan ,Material ada
		31. Tidak adanya Dranase dan Parit Miring	Lahan ,Material ada



		32. Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Lahan ,Material ada
		33. Kurangnya diminati Kegiatan Masyarakat di Malam Hari	Lahan Ada
		34. Kurangnya Jaringan Irigasi	Lahan ,Material ada
		35. Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke Tempat Evakuasi Tsunami	Lokasi Ada
		36. Tidak Adanya Lapangan Olah Raga yang Permanen	Lahan Ada, Kelompok Ada
		37. Kurangnya Jalan Lingkar Pemukiman Masyarakat	Lahan Ada, Material Ada
		38. Kurangnya Jaringan Irigasi	Lahan Ada, Material Ada
		39. Kurang Lancarnya Saluran Pembuang/Drenase	Lahan Ada, Material Ada
		40. Kurangnya Pengaman Tebing	Lahan Ada, Material Ada
		41. Kurangnya Akses Jalan Rumah Masyarakat	Tenaga Ada, lahan Ada
		42. Tidak Adanya Akses Jalan Usaha Tani dan Perkebunan	Lahan Ada, Tenaga Ada
		43. Kurang Layaknya Poskeamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lahan Ada, Tenaga Ada
		44. Sulitnya Menempuh Jalan Ke	Lahan Ada



		Pandam Kuburan	
		45. Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Lahan Ada, Pengunjung Ada
		IV. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
		10. Belum Tersedianya Bak Penampung Sampah Rumahan	Lahan Ada
		11. Banyaknya Masyarakat Kurang Mampu	RTLH Ada, Lahan Ada
		12. Kurang Tersedianya Air Bersih di Kawasan Agropolitan	Lahan Ada, RT Ada
		13. Kurang tersedianya Wahana Bermain Anak	Lahan Ada, anak-anak ada
		14. Menggenangnya Limbah Rumah Masyarakat	Lahan Ada
		15. Kurang Layaknya Air Kebutuhan Rumah Tangga	RTM Ada, Lahan Ada
		V. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Lahan ada Material ada
		VI. Penanggulangan Bencana	
		☞ Belum terbentuknya siaga bencana	Tenaga sukarela ada
		☞ Belum terbentuknya dapur lima	Tempat ada
		☞ Belum adanya simulasi pembuatan tenda darurat	Sumber dana ada ADD dan DD



		☞ Belum adanya bantuan logistik ☞ Belum tersedianya Bantuan Keadaan Mendesa	Laut dan Masyarakat Ada Potensi kewilayahan bencana ada

3.1.2. Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Kalender Musim

TabelKalender Musim

KEGIATAN/ BULAN	Ja n	Fe b	M ar	Ap r	Me i	Ju n	Ju l	Ags t	Sep t	Okt	Nop	Des
A. IKLIM												
▪ HUJAN	☈			☈	☈	☈			☈	☈	☈	
▪	x			xx	xx	xx			Xxx	Xxx	xxx	
▪ KEMARAU		☀	☀				☀	☀				☀
Pembusukan	:			:	:	:			:	;	:	
B. PENGOLAHAN LAHAN												
▪ TANAM	Δ							Δ			Δ	Δ
▪ PANEN		òó	Òó			òó			òó			Òó
▪ PACAKLIK				x	x							
▪ HAMA PENYAKIT			Ö								Ö	
▪ PEMASARAN HASILPERTA		√	√					√			√	√



NIAN												
▪ Pemasaran hasil keluatan		:	:				:	:				:

X = Sedikit

XX = Sedang

XXX = Sering/Kebanyakan

Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari
Menggunakan Kalender Musim Kampung Batang tindih

N O	KAMPUNG	MUSIM	KEGIATAN	MASALAH	POTENSI
1	Batang tindih dan Air Pilah	I. <u>Hujan</u>	<u>Tanam Padi</u>	- Bibit padi unggul susah didapat	Lahan Ada Petani Ada
			<u>Panen</u>	- 1. Sering terjadi banjir disaat hari hujan	Curah Hujan Tinggi
			<u>Pasca Panen</u>	2. Tidak bisa bercocok tanam	Curah Hujan Tinggi
			<u>Melaut</u>	3. Ikan sering membuasu k	Ikan ada



				4. Terkendala pelaut	Peralatan ada
				5. Air laut keruh	Laut tidak bergelombang
		II. KEMARA		6. Banyak terjangkit penyakit Demam Berdarah	Curah Hujan Tinggi
				7. Ternak kekurangan makanan	Semangat peternak ada
				8. Jalan Becek	Curah Hujan Tinggi
				9. Jalan berdebu	Badan jalan ada
				10. Air laut jernis	Semangat ada
				11. Ikan kadang tidak ada	Semangat ada
				III. <u>Tanam</u>	
				1. Kurang benih padi unggul	Hasil Panen Menurun
				2. Harga pupuk mahal	Hasil Panen Menurun



				3. Banyak ternak warga yang lepas dan merusak padi yang baru ditanam	Hasil Panen Menurun
				4. Kurangnya Obat Pengendalian Hama Perusak Tanaman	Hasil Panen Menurun
				IV. <u>Panen</u>	
				1. Harga jual – beli yang murah	Petani Rugi
				2. Hasil panen sedikit	Petani Rugi
				3. Upah yang mahal	Petani Rugi
				V. <u>Pemasaran Hasil Kebun</u>	
				1. Susahnya tempat pemasaran	Harga Sawit Murah
				2. Tidak adanya Perusahaan	Harga Sawit Murah



				Pengelolaan Sawit	
				VI. <u>Peceklik</u>	
				1. Harga kebutuhan pokok mahal	Kemiskinan
				2. Ekonomi penduduk makin merosot	Kemiskinan
				3. Pelayanan kesehatan sangat sedikit dan harga obat mahal	Kemiskinan
				4. Kurangnya rasa ukhuwa islamiah	Kemiskinan

3.1.3. Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan

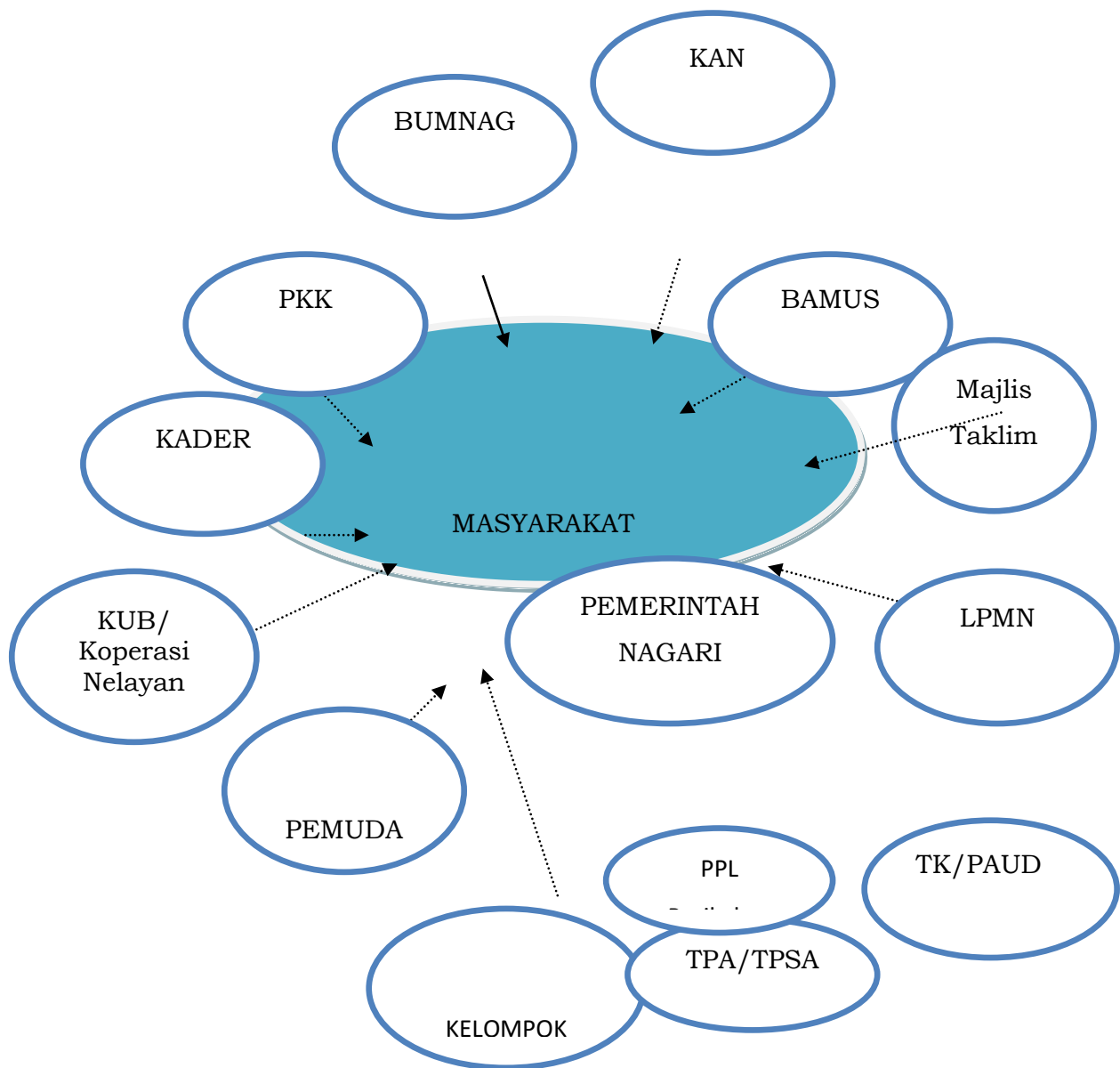
Pengkajian keadaan nagari menggunakan bagan kelembagaan dilakukakan dengan cara :

1. Tim penyusun Revisi RPJMNag telah melakukan identifikasi kelembagaan yang ada dinagari Pulau Rajo Inderapura Melalui rembuk Kampung / Penggalan gagasan sebagai Berikut :

- 1) Pemerintah Nagari



- 2) Bamus
 - 3) LPMN
 - 4) PKK
 - 5) KAN
 - 6) BUMNAG
 - 7) Kader
 - 8) Kelompok Tani
 - 9) Majelis Taklim
 - 10) TPA / TPSA
 - 11) Majlis Taklim
 - 12) Tk/PAUD
 - 13) KUB Nelayan
 - 14) PPL Perikanan
 - 15) Koperasi Nelayan
 - 16) Dst
2. Setelah dilakukan identifikasi kelembagaan oleh Tim Revisi RPJMNag menyampaikan kepada peserta Musyawarah tentang dampak dan hubungan dapat disimpulkan bahwa besar atau kecil lingkaran dan jauh atau dekatnya menggambarkan kondisi hubungan antar kelembagaan, Pemerintah Nagari dengan masyarakat.



Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan Kampung Batang tindih

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI	SOLUSI
1	Batang tindih	I. <u>Pemerintahan Nagari</u>		
		1. Belum Maksimalnya Pelayanan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Pemerintahan Nagari Ada	Tingkatkan pelayanan



				kedisiplinan
		2. Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar	Pelatihan
		3. Anggaran Nagari Belum Berimbang	Semangat Kerja Tinggi	Penambahan Anggaran
		II. <u>BAMUS</u>		
		1. BAMUS kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu	Pelatihan
		2. Kurang biaya Transportasi	Ada dana DAUN	Penambahan anggaran
		3. Kurangnya Pengetahuan BAMUS tentang nagari	Adanya Tamatan Sarjana	Evaluasi dan pembekalan
		4. Fungsi Kewenangan Belum Terlaksana Secara Maksimal	Sumber Daya Manusia Ada	Peningkatkan IQ dan kemauan
		5. Kurang Lengkapnya Peraturan Nagari	BAMUS ada	Pembuatan Pernag dan Pembekalan
		III. <u>LPMN</u>		
		1. Kurangnya Pengetahuan LPMN tentang potensi	Adanya Tamatan	Peningkatan ilmu dan



		nagari	Sarjana	Survey
		2. Tidak adanya biaya Transportasi	Ada dana DAUN	Penambahan anggaran
		3. Kurang mengetahui Tupoksi LPMN	Tersedianya Buku Petunjuk	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan
		4. LPMN kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu	Harus bisa berdampingan
		IV. <u>KPMN/T</u>		
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitasi masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana	Peningkatan ilmu dan Survey
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana DOK	Penambahan anggaran
		3. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Banyak SDM	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan
		V. <u>KAN</u>		
		1. Kurangnya Kesejahteraan KAN	Pengurus KAN ada	Materi langsung



				kenagari sesuai kebutuhan
		2. Kegiatan KAN tidak aktif.	KAN ada	Anggaran dan pendekatan itu perlu
		VI. <u>PKK</u>		
		1. Kurangnya Kesejahteraan Kader PKK	Kader ada, PKK ada	Penambahan anggaran
		2. Kegiatan PKK tidak aktif.	PKK ada	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan
		3. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran	Penambahan Sumber dana stemby
		VII. <u>Majelis Taqlim</u>		
		1. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran	Penambahan Sumber dana stemby
		2. Susahnya berkumpul bersama anggota	Ada perkumpulan	Anggaran ada
		3. Penganggaran Sangat Minim	Anggaran ADPN	Penambahan anggaran



		4. Kurangnya Perlengkapan Majelis Taqlim	Majelis Taqlim ada	Penganggaran stemby
		VIII. PPL 1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitas masyarakat 1. Kurangnya dana untuk transportasi 2. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Adanya Tamatan Sarjana Ada Dana APBD Banyak SDM	
		IX. BUMNAG 1. Kurangnya kemampuan SDM dalam kepengurusan 2. Kurangnya pendanaan pengelolaan	Adanya Tamatan Ada Dana DD	Pembekalan bimtek
		X. Pemuda 1. kemampuan SDM dalam kepengurusan 2. kurangnya fasilitas	Adanya kepengurusan Semangat dan keinginan ada	Bimtek
		XI. kelompok Tani 1. kurangnya fasilitas dan	Semangat dan	Anggaran ADD



		pembibitan	tana bertani ada	dan DD stemby
		XII. TPA/TPSA 1. Kurangnya perlengkapan anak-anak	Keinginan dan kemampuan ada	Anggaran ADD dan DD stemby
		XIII. Koperasi dan KUB 1. Kurangnya semangat anggota 2. Tidak adanya bantuan	Fasilitas tidak memadai Dana APBD	Bimtek dan penganggaran stemby
		XIV. TK/PAUD 1. Kurangnya perlengkapan anak-anak bermain 2. Kurangnya partisipasi guru dalam meningkatkan kedisiplinan dan kebersihan	Sumber dana DD Ada Adanya sarjana	Penganggaran dan bimtek
		XV. PPL Perikanan 1. Kurangnya keinginan anggota Koperasi dan KUB untuk meminta kunjungan	PPL ada	Peningkatan pertemuan



Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan
Bagan Kelembagaan Kampung Air Pilah

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI	POTENSI
2	Air Pilah	<u>I. Pemerintahan Nagari</u> 1. Belum Ada Kantor Wali Kampung 2. Kurangnya Aparatur Nagari	Tersedianya Lahan Adanya Tamatan Sarjana	Tingkatkan pelayanan kedisiplinan Pelatihan
		3. Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar	Penambahan Anggaran
		<u>II. BAMUS</u> 1. BAMUS kurang dekat dengan Masyarakat 2. Kurang biaya Transportasi 3. Kurangnya Pengetahuan BAMUS tentang nagari	Tersedianya waktu Ada dana DAUN Adanya Tamatan Sarjana	Pelatihan Penambahan anggaran Evaluasi dan pembekalan



		III. <u>LPMN</u> 1. Kurangnya Pengetahuan LPMN tentang potensi nagari 2. Tidak adanya biaya Transportasi 3. Kurang mengetahui Tupoksi LPMN 4. LPMN kurang dekat dengan Masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana Ada dana DAUN Tersedianya Buku Petunjuk Tersedianya waktu	Peningkatkan IQ dan kemauan Pembuatan Pernag dan Pembekalan Peningkatan ilmu dan Survey Penambahan anggota
		IV. <u>KPMN/T</u> 1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitasi masyarakat 2. Kurangnya dana untuk transportasi 3. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Adanya Tamatan Sarjana Ada Dana DOK Banyak SDM	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan Harus bisa ber dampingan Peningkatan ilmu dan Survey
				Penambahan



		V. <u>KAN</u>		anggaran
		1. Kurangnya Kesejahteraan KAN	Pengurus KAN ada	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan
		2. Kegiatan KAN tidak aktif.	KAN ada	
		VI. <u>Karang Taruna</u>		Materi langsung kenagari sesuai kebutuhan
		1. Bidang Kesenian Tradisional Kurang Berkembang	Alat ada, Pemain ada	Anggaran dan pendekatan itu perlu
		2. Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Modern Masih Kurang	Anak ada	
		VII. <u>PKK</u>		Penambahan anggaran
		1. Kurangnya Kesejahteraan Kader PKK	Kader ada, PKK ada	Peningkatan dalam pembelajaran dan pembekalan
		2. Kegiatan PKK tidak aktif.	PKK ada	Penambahan Sumber dana stemby



		3. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran	
		VIII. <u>Majelis Taqlim</u>		Penambahan Sumber dana stemby
		1. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran	Anggaran ada
		2. Susahnya berkumpul bersama anggota	Ada perkumpulan	Penambahan anggaran
		IX. <u>PPL</u>		
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitas masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana	Peningkatan pertemuan
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana APBD	
		3. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Banyak SDM	



3.1. 4. Pengelompokan Masalah

Penggabungan semua masalah dari Sketsa nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan sesuai bidang dan mencari tindakan yang layak

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternative Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
PENDIDIKAN					
1	Rumah dinas Guru tidak ada, Mutu pendidikan rendah	Jarak tempuh sangat jauh	Jumlah usia sekolah cukup banyak, lahan ada	rumah dinas guru di air pilah	Swadaya masyarakat ada, tanah hibah ada
2	Perlunya sekolah kejuruan, Biaya sekolah mahal, Buku-buku mahal	Ekonomi kurang memadai	Tingginya minat anak untuk sekolah di kejuruan	Pengadaan Beasiswa	Banyak nya siswa kurang mampu
3	Masih minimnya keterampilan/k eahlian masyarakat	Penggang guran jadi banyak	Minat baca dan semangat masyarakat sudah mulai muncul	Pelatihan perbengkelan /computer	Pemuda tamatan, penganggura n ada



4	Tidak lengkapnya peralatan siswa, belum tertibnya jam belajar	Kurang mampu	Semangat belajar siswa tinggi	Ketegasan dan peraturan dalam sekolah lebih dipentingkan	Guru banyak, potensi ada
5	Perpustakaan belum ada	Tingginya semangat murid dan masyarakat untuk membaca	Banyaknya waktu bermain bagi anak dalam waktu pelajaran sekolah	Pembangunan dan pengadaan perpustakaan/taman baca murid dan masyarakat	Swadaya dan tanah masyarakat ada
6	Sarana pendidikan belum memadai	Jarak tempuh siswa sangat jauh,	Lahan ada	Pembangunan gedung SD jarak jauh	Swadaya masyarakat ada, tanah hibah ada
7	Sarana pendidikan belum memadai	Kebersihan tidak terkendali	Lahan ada	Pembangunan Pagar SD/SLTP	Penjaga sekolah ada
8	Sarana pendidikan belum memadai	Kebersihan tidak terkendali	Lahan ada	Pengadaan MCK SLTP	Swadaya ada
9	Dana kelompok kurang memadai	Kurang mampu	Kelompok ada	Pelatihan pengurus koperasi, gapoktan, LKMA dan anggota	Tingginya semangat kelompok



10	Tidak adanya biaya anak, tidak adanya pendidikan ekstrakurikuler	Siswa terlalu bebas	Banyaknya anak menuntut ilmu keluar nagari	lest sore siswa	Tempat lest ada, guru ada
11	Tidak adanya biaya anak, tidak adanya pendidikan ekstrakurikuler	Siswa terlalu bebas	Banyaknya anak menuntut ilmu keluar nagari	Pengadaan Bis sekolah	Sopir, Inventarisir ada
12	Masih minimnya keterampilan/k eahlian bagi ibu-ibu pkk	Penggang guran jadi banyak	Ibu – ibu ada	Pelatihan menjahit dan menyulam bagi ibu PKK	Minat dan semangat ada
13	Sarana dan prasarana murid kurang	Susahnya murid saat belajar	Murid banyak	Pengadaan mobiler TPA/TPSA	Semangat anak tinggi
14	Masih minimnya skill pemuda saat olahraga	Atlitnya tidak ada	Pemain ada	Pembinaan pemuda dan olah raga	Semangat pemuda untuk olah raga sangat tinggi
KESEHATAN					
15	Masih kurang nya pelayanan dalam kesehatan	Kurangny a sarana dan prasarana pembang	Masyarakat dan bumil ada	Rehap PUSTU dan POSKESRI yang lebih baik	Pelayanan masyarakat Full 1x24 jam



		unan			
16	Tamatan S1 Banyak berbagai jurusan ada dimana-mana	Lowongan pekerjaan belum terbuka	Bidan desa anak nagari ada	Memberdaya kan/mempek erjakan bidan desa/nagari	Keinginan tinggi
17	Belum optimal nya perhatian pemerintah	Banyak nya masyarak at kurang mampu	Masyarakat ada	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih	Swadaya masyarakat ada
18	Sarana kesehatan belum optimal	Banyak nya masyarak at kurang mampu	Masyarakat lansia banyak	Pemeriksaan rutin lansia dan bantuan obat-obatan	Tingginya semangat masyarakat ttg diri dan kesehatan
19	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti kesehatan	Pemuda sering mabuk	Pentingnya kesehatan bagi masyarakat sudah mulai muncul	Pembinaan/ penyuluhan kesehatan	Target pembinaan banyak
20	MCK belum ada	Banyak nya masyarak at kurang mampu	Banyaknya masyarakat miskin	Pembangunan MCK dan air bersih	Masyarakat ada
21	Jamkesmas dan jamkesda sangat kurang	Ekonomi masyarak at lemah	Banyaknya masyarakat miskin	Pengadaan Jamkesmas dan Jamkesda	Banyaknya Masyarakat kurang membutuhka n



22	Belum terlaksananya pagar rumah sakit yang secara menyeluruh	dana tidak ada	Lahan ada	Pembangunan Pagar pustu	Kenyamanan, keindahan dan kebersihan
23	Kurangnya pemahaman Pemuda/I tentang arti kesehatan	Pemuda sering mabuk	Pemuda/ I ada	Pengadaan Penyuluhan terhadap narkotika	Target pembinaan banyak
24	Sarana kesehatan dan tempat senam belum ada	Banyaknya ibu-ibu saat melahirkan sesar	Tingginya semangat ibu-ibu dalam senam sehat	Memberdayakan senam jantung sehat	Peminat ibu-ibu sangat banyak
25	Ambulan nagari tidak ada	Jauhnya jarak tempuh menuju puskesmas induk	Banyaknya masyarakat miskin	Pengadaan ambulan nagari	Bumil banyak
26	Banyaknya masyarakat yang kurang mampu	Lemahnya ekonomi masyarakat	Banyaknya masyarakat miskin	Pengadaan pansimas	Masyarakat ada

SARANA DAN PRASARANA

27	Lapangan olah raga tidak	Kurangnya	Lapangan ada	Pembangunan tribun mini	Swadaya pemuda dan
----	--------------------------	-----------	--------------	-------------------------	--------------------



	memadai	modal untuk pengadaan lapangan		lapangan bola kaki	masyarakat ada
28	Jalan masih tanah dan berlobang	Kurang nya dana nagari dan kurang perhatian pemerintah kab	Jalan ada	Pembukaan/ pengerasan/ pengaspalan jalan	Masyarakat ada
29	Terhambatnya petani saat mengeluarkan hasil panennya	Kurang nya perhatian pemerintah	Swadaya pembangunan jembatan plat beker ada	Pembangunan/perbaikan jembatan	Swadaya masyarakat ada
30	Terhambatnya petani saat mengeluarkan hasil panennya	Belum terjangkau dari dana nagari	Badan jalan untuk pembangunan plat beton ada	Pembangunan saluran irigasi dan Pencucian Parit Irigasi	Swadaya masyarakat ada
31	Tanah kurang dimanfaatkan oleh	Kurang nya dana	Luasnya areal pertanian,perkebunan dan	Pengadaan alat produksi perikanan,	Tinggi semangat masyarakat



	masyarakat		kelautan masyarakat	pertanian	tani dan nelayan
32	Kurangnya penerangan,ada sejumlah kampung yang belum ada jaringan listrik	Tidak adanya PLN	Peminat masyarakat banyak	Pengadaan listrik/instal asi/mikro hidro	Peminat masyarakat 100%
33	Lapangan kurang memadai	Kurang rawat	Lapangan ada	Rehap lapangan bola kaki	Swadaya pemuda dan masyarakat ada
34	Banyaknya ternak di pemakaman TPU	Sering dilintasi ternak	Tanah dan swadaya ada	Pagar pandam pekuburan	Swadaya masyarakat ada
35	Susahnya roda dua dan empat saat beroperasi karena jalan kurang memadai	Masyarakat dan pengen daraan banyak	Koral ada	Pengaspalan jalan nagari	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
36	Kurangnya pantauan pemerintah	Wisata yg diorbit kan ada	Jalan, koral ada	Pembukaan jalan pariwisata dari pasir gantung sampai ke air uba	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
37	Jarak tempuh sangat jauh	Sering anak/	Anak/murid ada	Pembanguna n gedung SD	Swadaya masyarakat



		murid terlamb at		jarak jauh	ada (Tanah)
38	Susahnya petani dalam pengangkutan hasil taninya	Lambat nya hasil penjualan	Adanya tanaman pertanian	Pembanguna n jembatan gantung ke pulau rajo	Petani ada
39	Banyak nya masyarakat tidak mampu	Miskin modal dan pekerjaan	Tanah masyarakat dan swadaya untuk pematangan lahan lokasi rumah tapak ada	Pematokan lahan lokasi rumah tapak	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
40	Banyaknya petani mengalami gagal panen	Kurang nya aliran air	Tanah ada untuk pembangunan parit miring ada	Pembanguna n parit miring	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
41	Perlunya pengembangan pemukiman	Banyak nya Lahan tidur	Banyaknya perahu masyarakat nelayan	Pembukaan jalan Baru kemuara gedang	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
42	Pakumnya pemuda saat ronda	Pos ronda Belum didirikan	Pemuda dan masyarakt ada	Pembanguna n poskamling	Adanya swadaya masyarakat
43	Masyarakat banyak	Belum adanya dana	Bentuk jalan untuk melanjutkan pengerasan ada	Pelebaran jalan rabat beton	Swadaya masyarakat ada (Tanah)
44	Susahnya	Lambat	Adanya tanah	Pembanguna	Swadaya



	petani dalam pengangkutan hasil taninya	nya hasil penjualan	pertanian masyarakat	n jembatan bt.terendam	masyarakat ada
45	Lapangan kurang memadai	Dana pemuda a minim	Tingginya semangat pemuda dalam olahraga	Pengadaan lapangan foot sal	Swadaya masyarakat ada
SOSIAL BUDAYA					
46	Kesulitan alat music tradisional	Pengangga ran belum terinci	Tingginya minat masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional	Pengadaan alat-alat kesenian	Anak kesenian ada
47	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang adat	tidak adanya Penyuluhan profesional tentang adat	Sanak kopenakan untuk dibina banyak	Penyuluhan masalah adat	Antusiasnya Sanak kopenakan dalam pengetahuan adat
48	Peralatan olah raga kurang	Dana pemuda minim	Pemuda ada	Pengadaan peralatan olah raga	Tingginya semangat pemuda dalam olah raga
49	Sulitnya pengadaan	System tunggu	Pranata agama,	Pengadaan pakaian adat	Adanya pertunjukan



	pakaian adat		budaya/adat masih menjadi nilai dasar masyarakat	minangkabau	tradisi adat
50	Minimnya ilmu seni masyarakat	Tidak adanya Atlit seni	Tingginya antusias masyarakat untuk melestarikan sanggar seni	Pengadaan sanggar seni	Banyaknya peminat anak-anak dalam kegiatan sanggar seni
KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT					
51	Minimnya pembinaan UKM	Kurangnya modal	Jumlah UKM banyak	Pembinaan terhadap UKM	Usaha dan keterampilan masyarakat ada
52	Kurangnya pengetahuan SPP	Sering kelompok mengalami macet	Jumlah kelompok simpan pinjam cukup banyak bermunculan	Tambahan modal untuk simpan pinjam	Kelompok lancar
53	Minimnya pembinaan perkoperasian	Baru dibentuk	Koperasi ada	Penyuluhan/ pelatihan tentang koperasi	Struktur Koperasi ada
54	Kurangnya modal	Kurangnya modal	Tenaga bengkel ada	Modal, alat-alat	Tenaga ahli ada



				kerajinan dan bengkel	
55	Persyaratan terlalu banyak	Pengetahuan admin kurang	Peminjam ada	Kredit usaha rakyat	Tingginya peminat
56	Kurangnya pengetahuan	Pelatihan kurang	Struktur ada	Pembinaan pengurus Gapoktan dan LKMA	Struktur gapoktan ada
57	Sulitnya memperoleh bibit sawit bermutu	Minimnya Modal masyarakat	Jumlah kelompok tani cukup banyak	Pengadaan bibit sawit unggul	Tanah masyarakat banyak kosong
58	Sulitnya memperoleh bibit palawija bermutu	Peminat sangat banyak	Luasnya lahan untuk berkebun	Pengadaan bibit pala wija, kacang tanah,padi dan jagung	Tanah dan semangat masyarakat tinggi
59	Sulitnya masyarakat peternak ayam dan sapi mengembang usahanya	Peminat sangat banyak	Ditumpangs arikan dengan peternak ayam, kambing, dan sapi	Pengadaan bibit 79ias79 an ayam	Pengembala (peternak) banyak
60	Minimnya bibit ikan lele dan nila	Banyaknya masyarakat miskin	Tersedianya areal untuk budidaya ikan lele dan nila	Pengadaan bibt ikan nila dan lele jumbo	Peminat banyak
61	Minimnya bibit ikan	Banyaknya masyarakat	Adanya semangat	Pengadaan alat	Para nelayan ada



		miskin	para nelayan saat melaut	pengelolaan ikan	
62	Ikan sering membusuk	Terlambat olahan	Adanya semangat para nelayan saat melaut	Mengadaan temple mesin Yamaha 15 PK	Kelompok dan masyarakat miskin banyak
63	Tidak adanya alat pengelolaan dan penyimpanan ikan	Peminat sangat banyak	Banyaknya pendapatan peningkatan ikan	Pengadaan tharmokking ikan	Peminat ikan banyak
64	Tidak adanya penyanggah mengatasi abrasi pantai	Bibir pantai sering terkikis	Banyaknya masyarakat ditepi laut	Pembangunan pengamanan /tanggul abrasi pantai	Pantai ada
65	Ikan membusuk	Terlambat olahan	Adanya semangat para nelayan saat melaut	Pengadaan alat tangkap ikan	Para nelayan ada
66	Resahnya para nelayan pukat katrol selalu beroperasi	besar kecil nya ikan terangkut	Adanya semangat nelayan	Pengadaan kapal cangkik untuk nelayan	Semangat nelayan membela ekonomi sangat tinggi
67	Ekonomi terhambat akibat sering	Sering beroperasi	Tingginya semangat masy dalam	Pengadaan kapal pemburu	Persatuan nelayan ada



	pukat harimau beroperasi		mengatasi masalah pukat harimau	pukat lempira dasar/pukat katrol (pukat harimau)	
68	Banyaknya masyarakat bagian dalam terletak ditepi pantai	Jalan menuju evakuasi sangat jauh sekali	Banyaknya masyarakat ditepi laut	Pembangunan gedung shalter tempat evakuasi gempa dan tsunami	Pantai ada
69	Resahnya sampan/perahu/jongkong saat berlabuh	Ikan banyak tidak terjual	Adanya tempat pembutan TPI	Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI)	Banyaknya nelayan bertransaksi /penjualan ikan
70	Belum tersedia tempat yang baik bagi pengunjung	Susahnya para nelayan saat berlabuh	Banyak sampan ditepi pantai	Pembukaan muara baru	Banyaknya nelayan berlabuh
71	Kurangnya modal pengadaan ternak	Kurangnya modal masyarakat	Padang rumput banyak	Integritas kebun ternak	Peternak ada
72	Sungai dipenuhi enceng gondok	Terganggu masyarakat saat mandi (tidak bisa beroperasi)	Sungai ada	Normalisasi sungai	Masyarakat banyak
73	Kurang	Kurang	Adanya	Pengadaan	Petani,



	semangat masy budidayakan pohon klingking karena modal tidak ada	modal masyarakat	Lahan swadaya masy penanaman pohon klingking	pohon klingking	pekebun , dasawisma ada dan banyak
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA					
74	Perlunya anggaran sumbangan dari pemnag	Bencana Alam	Banyaknya masyarakat ditepi laut	Adanya tindakan langsung dari pemnag kepada Masyarakat Nelayan	

3.2. Musyawarah Nagari Revisi RPJM Nagari

A. Penyusunan Revisi RPJMNag

Penyusunan Revisi RPJMNag di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Nagari Pulau Rajo Inderapura dengan menggunakan dengan Alat pada :

1. Sketsa nagari
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

No	Kampung	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Batang tindih	Meracu kepada RPJm awal	Kantor Wali
2	Air Pilah	Meracu kepada RPJm awal	Kantor Wali



Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat kampung, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

B. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Nagari dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokkan Masalah masalah dari hasil musyawarah Nagari,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi - Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.

C. Musrenbang RPJMNag



Berdasar hasil lokakarya Nagari selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Nagari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan musrenbang Nagari.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen Revisi RPJM Nagari Pulau Rajo Inderapura merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen Revisi RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Nagari Pulau Rajo Inderapura, kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 10 Nagari di kecamatan Airpura yang mempunyai jarak 126Km dari kota kabupaten. Kecamatan Airpura sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Pulau Rajo Inderapura sendiri terletak di perbatasan sebelah dengan laut- utara Nagari Air Haji LSB- timur sungai dan selatan berbatasan Nagari samungu/silaut. tanahnya adalah dataran rendah, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan, Pengolahan nelayan, pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah Nelayan/Perikanan.

Nagari Pulau Rajo Inderapura terdiri dari 2 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, Satu Orang Sekretaris, Dua orang Kasi, Tiga Orang Kaur, Satu Orang Staf Nagari dan 2 orang Wali Kampung, mempunyai jumlah penduduk 1.246 orang yang terdiri dari 672 orang laki-laki, 574 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 185 RTM.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari)



1. Tujuan penyusunan Revisi RPJM-Nagari adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan Revisi RPJM-Nagari

- a. Lengkap artinya Revisi RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
- c. Sistematis artinya Revisi RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan
- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan Revisi RPJM-Nagari

3. Kaidah Penyusunan Revisi RPJM-Nagari

- a. Revisi RPJM-Nagari sebagai Proses Pemikiran Strategis
- b. Revisi RPJM - Nagari sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

4. Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari



Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. 1 (satu) orang Pengurus LPMN.
- d. 1 (satu) orang Kaur Pencanaan
- e. 2 (dua) orang KepalaKampung
- f. 2 (dua) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

5. Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi
Pemerintah Nagari berkewajiban menyebar luaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - a) Rencana penyusunan Revisi RPJM-Nagari
 - b) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan Revisi RPJM-Nagari
 - c) Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
 - d) Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - e) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari.

6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari

- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
- b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:



1) Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari adalah :

- a) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pembukaan
- b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud mencakup:
 - i. Penjelasan proses penyusunan Revisi RPJM-Nagari
 - ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
- d) Penetapan anggota Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari.



Anggota Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan Revisi RPJM-Nagari
- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM- Nagari
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
- 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
- 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RPJM-Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya Rancangan Revisi RPJM-Nagari

- b. Sekretaris Nagari

Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:



- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
- 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan Revisi RPJM-Nagari

c. Pengurus LPMN, Kepala kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
- 2) Membahas dan merumuskan Rancangan Revisi RPJM-Nagari

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Revisi RPJM- Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang Revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan Revisi RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :



- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun Revisi RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RPJM- Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RPJM-Nagari.

11. Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat. masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- 1) Potensi nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi
- 3) Kebutuhan masyarakat



c. Pendamping

Kegiatan pengkajian keadaan nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN

d. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Nagari).

e. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- 3) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan

g. Waktu Pelaksanaan



Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- 1) Data Potensi Nagari
- 2) Data Permasalahan
- 3) Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

12. Penyusunan Rancangan Revisi RPJM-Nagari

a. Rancangan Revisi RPJM-Nagari

Rancangan Revisi RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:

- 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari
- 2) Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
- 3) Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

13. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang



- dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (7) Koperasi dan usaha masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Peternakan ; (3) Perkebunan, (4) Pariwisata. dan (5) Kelautan/Perikanan, (6) Penanggulangan keadaan darurat (bencana/KLB)
 - f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
 - g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

14. Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan Revisi RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain. seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan Revisi RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
 - 1) Rapat Pleno



- Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
- Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi

2) Rapat Komisi

- Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
- Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
- Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
- Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
- Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

3) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan Revisi RPJM-Nagari.

4) Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) Revisi RPJM-Nagari

15. Pembahasan Rancangan Revisi RPJM-Nagari

a. Forum Pembahasan



- 1) Rancangan (Awal) Revisi RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.
- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) Revisi RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah :

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin
- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- 7) Fasilitator
- 8) Proses pembahasan Rancangan Revisi RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan Revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) Revisi RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun



- 6) Pembahasan oleh peserta
 - 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
 - 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
 - 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
 - 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
 - 12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan Revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.
- d. Penutupan oleh Wali Nagari
- e. Hasil
- Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

16. Penetapan Rancangan Revisi RPJM-Nagari

a. Forum Penetapan

- 1) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS. Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS
- 2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM-Nagari adalah :

- 1) Semua Anggota BAMUS
- 2) Wali Nagari
- 3) Sekretaris Nagari



- 4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- 5) Anggota Tim Penyusun Rancangan Revisi RPJM-Nagari
- 6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- 7) Pengurus Ormas dan/atau LSM
- 8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

- 1) Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang Revisi RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- 2) Penetapan/Pengesahan
- 3) Rancangan (Akhir) Revisi RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

17. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang Revisi RPJM-Nagari kepada BAMUS. paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) Revisi RPJM-Nagari

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang Revisi RPJM-Nagari
- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang Revisi RPJM-Nagari diterima.

b. Proses Rapat Penetapan

- 1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat



- 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Tanggapan Anggota BAMUS
- 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
- 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang Revisi RPJM- Nagari
- 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
- 7) Hasil
- 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang Revisi RPJM-Nagari

18. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan Revisi RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Propinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat



BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (LIMA TAHUN)

4.1. VISI NAGARI

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan Nagari, yaitu Visi WaliNagari. Visi Pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2019 s/d 2023. Fungsi Visi Pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Pulau Rajo Inderapuramasih dijumpai masalah masalah yang perlu ditangani sungguh sungguh pada periode 2019 s/d 2023 yaitu pada bidang: Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infra Struktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran, Pemerintahan dan Nelayan/Perikanan. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura dalam periode 2019 s/d 2023 menetapkan Visi sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
SEBAGAI NAGARI YANG MANDIRI, BERSATU DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAN BERTAQWA ”.***

4.2. Misi

Berdasarkan Visi diatas maka Misi yang dicapai sebagai Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura Periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan kabapilitas perangkat nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundangan, guna tercapainya pelayanan yang baik dan bersih bagi masyarakat.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas serta mendayagunakan



kelembagaan, organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dinagari Pulau Rajo Inderapura (BAMUS, LPMN, KAN, PKK, BUMNag, Pemuda, Majelis Taklim, LPMN, TK/PAUD, KUB Nelayan, PPL Nelayan dan Koperasi Nelayan) dan kelompok masyarakat Lainnya.

Program kerjanya: Organinsasi & kelompok masyarakat akan ditumbuhkembangkan sebagai wadah/alat pemersatu dan penggerak kegiatan pembangunan yang bersifat partisipasi.

3. Melaksanakan Pembangunan & Pemberdayaan masyarakat secara jelas, terarah, terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud secara bertahap kesejahteraan masyarakat nagari Pulau Rajo Inderapura.

Program kerja: **Pembangunan fasilitas umum nagari** yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pengelolaan jalan usaha tani, saluran irigasi pertanian, jalan lingkung pemukiman, gang, sarana air bersih, rumah layak huni, sarana keagamaan dan pendidikan serta infra struktur lainnya. **Pemberdayaan sumber daya manusianya** dalam peningkatan ketrampilan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Anggota DPRD Kabupaten, provinsi dan Pusat, serta Perantau lainnya dalam rangka Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dinagari Pulau Rajo Inderapura, sesuai juga dengan nawacita Presiden kita “**Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat desa-desa dalam kerangka NKRI**” dan Visi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan “**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamais, dan sejahtera**”.

Program kerjanya: Berkomunikasi yang baik dalam



rangkamengajak membawa program dari Pemda, Anggota DPRD, dan Perantau untuk bersama-sama membangun nagari Pulau Rajo Inderapura.

5. Meningkatkan Partisipasi, keterlibatan dan keikutertaan masyarakat dan menampung aspirasi dari unsur masyarakat nagari Pulau Rajo Inderapuradalam merencanakan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program pembangunan nagari yang termuat dalam dokumen Revisi RPJM nagari 5 tahun kedepannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Program kerjanya : Mengikutsertakan unsur masyarakatdalam musyawarah nagari, baik musyawarah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban & pelestarian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Pulau Rajo Inderapura.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau non formal serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama, budaya, dan adat istiadat.

Program kerjanya : Pembinaan Guru TK/PAUD, MDA/TPA & PEMBERDAYAAN Ninik Mamak, ulama, dan lain-lain guna mewujudkan masyarakat yang agamais dan berakhlak mulia.

7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan hidup bersih masyarakat nagari Pulau Rajo Inderapura.

Program kerjanya : Sosialisasi kesehatan, germas, sanitasi/jambanisasi, pembangunan/rehab poskesri/posyandu, pembangunan rumah baru/rehab rumah tidak layak huni,

Tabel. 4.1 Sinkronisasi Misi RPJM Kabupaten dengan RPJM Nagari

No	Misi RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Misi RPJM Nagari Pulau Rajo Inderapura
1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responentif dalam rangka peningkatan pelayanan	5. Mewujudkan Pemerintah Nagari yang mandiri.



	kepada masyarakat	
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah	6. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat.
3	Menwujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK)	7. Menyemarakkan syari'at islam dalam kehidupan masyarakat Nagari berdasarkan Al'quran dan sunnah. 8. Membudayakan kehidupan ABS-SBK (Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah) dalam kehidupan masyarakat.
4	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	4. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat Nagari.
5	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat terlarang	3. <i>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.</i>

10 Program Unggulan Kabupaten

1. RTLH
2. Jambanisasi
3. Air bersih
4. Kabupaten / Nagari Sehat
5. Pasar Kaget
6. Irigasi
7. Nagari Layak Anak



8. Pustaka Nagari
9. Olah Raga
10. Puskessos

6.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

6.1.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.



6.1.1.2. Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagairujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari Pulau Rajo Inderapuraperlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 4.2.1. : Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

Visi : “terwujudnya Nagari Pulau Rajo Inderapura Sebagai Nagari Yang Mandiri, Bersatu dalam mensejahterakan masyarakat dan bertaqwa ”				
N o	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Menyemarakkan syari’at islam dalam kehidupan masyarakat Nagari berdasarkan Al’quran dan sunnah.	Mewujudkan peningkatan ilmu keagamaan serta sadar betapa pentingnya pondasi keislaman	Terselenggaranya masyarakat islam yang beraqlak, sesuai ajaran alquran dan assunanah	Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban umat islam dilahirkan
			Terciptanya keharmonisan hubungan Masyarakat	Menciptakan keharmonisan



				hubungan bermasyarakat
2	Membudayakan kehidupan ABS-SBK (Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah) dalam kehidupan masyarakat.	Menumbuhkan masyarakat desa yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat.	Terbentuknya masyarakat desa yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).	Meningkatkan mutu kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai.
				Pengembangan pendidikan non formal di tengah masyarakat.
				Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				formal.
				Optimalisasi fungsi mesjid dan surau/mushalla.
		Menciptakan kehidupan masyarakat desa yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.	Terciptanya masyarakat desa yang maju dan berbudaya serta mempunyai nilai akhlak terpuji.	Meningkatkan kinerja dan peran Pemuka Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta pemerintahan dan lembaga desa dalam pembinaan mental dan pemberdayaan masyarakat desa
				Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				istiadat.
				Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.
		Menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.	Terciptanya rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat desa.
				Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat.



				Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.
		Menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.	Terciptanya rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat desa.
			Terciptanya masyarakat desa memiliki solidaritas dan Moralitas yang tinggi serta kehidupan masyarakat desa dalam keseimbangan antara hidup rohani dan jasmani.	Menciptakan budaya saling menghormati.



		Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Pencegahan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; 2. Meningkatnya Status Gizi; 3. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah.	Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat desa.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di pemerintahan desa.	Pemantapan tata kelola pemerintahan desa, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat desa serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.



				Meningkatkan pelayanan Administrasi secara umum sesuai kebutuhan masyarakat desa.
				Menyempurnakan data administrasi kependudukan.
			Terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara sempurna.	Meningkatkan Animo masyarakat akan kebutuhan administrasi kependudukan dan identitas diri lainnya.
			Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah desa secara	Meningkatkan pelayanan secara profesional yang sama dan adil dalam upaya kepuasan



			keseluruhan.	masyarakat atas pelayanan pemerintah desa secara keseluruhan
4	Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat Nagari.	Pengembangan produktifitas sektor-sektor rill ekonomi desa.	Berkembangnya produktifitas sektor-sektor rill ekonomi desa dalam meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat desa.	Meningkatkan pengelolaan dan manajemen baik kelompok maupun perorangan.
5	Mewujudkan Pemerintah Nagari yang mandiri.	Mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip "Clean Government"	Terselenggaranya pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.	Mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan desa melalui Keterampilan, pelatihan dan pembinaan serta melengkapi sarana.



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

		yaitu pemerintah yang bersih.		
				Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
				Meningkatkan pemahaman kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
				Meningkatkan pemahaman tugas



				dan fungsi serta kewajiban lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
			Terciptanya keharmonisan hubungan kerja pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.	Menciptakan keharmonisan hubungan kerja pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				serta Instansi/Lembaga lainnya.
			Terciptanya Kerangka Aturan, Mantapnya Kelembagaan dan Keuangan serta Standarisasi, Kriteria, Norma dan Prosedur.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah desa bersama BPD dan lembaga desa lainnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan jalannya roda pemerintahan desa.
			Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan.	Meningkatkan kemampuan dan tata kelola serta Kualitas Kinerja pemerintah desa yang profesional serta disiplin



				pemerintah desa.
				Melengkapi sarana-prasarana Kantor desa sebagai penunjang kinerja pemerintah desa
6	Meningkatkan sarana prasarana penunjang ekonomi masyarakat	Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan infrastruktur desa.	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana berpotensi ekonomis dan infrastruktur desa dalam menunjang aktifitas masyarakat desa.	Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat desa.
				Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur oleh masyarakat desa untuk peningkatan



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				kualitas lingkungan.
--	--	--	--	----------------------



4.3. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nagari

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali Nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut

1. Sub Bidang Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

Prioritas Pembangunan

- a. Pengadaan bibit sawit
 - b. Pengadaan bibit palwija; kacang tanah, padi dan jagung
 - c. pengadaan pohon klingking
 - d. pelestarian hutan tanaman rakyat
 - e. pengadaan kapur tani
 - f. pengadaan bibit unggul padi
 - g. pembibitan karet
 - h. pembibitan kakao
 - i. pengadaan bibit jagung unggul
 - j. penanaman/pengadaan 1000 btg sawit
- dst

2. Sub Bidang Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

- a. Pembangunan gedung SD jarak jauh di Air Pilah
- b. Pembangunan/rehab/fasilitas gedung TK/PAUD Komplit
- c. Pelatihan pengurus Koperasi, Gapoktan, LKMA dan anggotanya



- d. Pelatihan bagi Nelayan, petani dan pengurus Kelompok Taniserta masyarakat
- e. Pelatihan kerajinan rumah tangga/PKK
- f. Pelatihan menjahit dan menyulam bagi anggota PKK
- g. Pembangunan perpustakaan /taman bacaan masyarakat
- h. Pelatihan perbengkelan/computer
- i. Beasiswa bagi anak kurang mampu
- j. Sekolah sepak bola (SSB)
- k. Pembinaan pemuda dan olah raga
- l. Pengadaan bis sekolah
- m. Pembangunan pagar SD/SLTP
- n. Pengadaan MCK SLTP
- o. Pengadaan mobiler TPA/TPSA
- p. Operasional TK/PAUD
- q. Honorarium Guru TK/Paud
- r. Kendaraan dinas guru TK/Paud
- s. Pelatihan bicara adat
- t. Pelatihan pemdes
- u. Pelatihan SKPD nagari
- v. Pelatihan siskamling
- w. Pelatihan posyantek
- x. Pelatihan membuat kue
- y. Pelatihan menjahit
- z. Sp, perempuan
- aa. Pelatihan tata boga
- bb. Pelatihan Nagari siaga
- cc. Pelatihan mesin jahit
- dst

3. Sub Bidang Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu



hamil).Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

- a. Rehap PUSTU dan Poskesri yang lebih baik
 - b. Pengadaan Bidan Desa
 - c. Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih
 - d. Pemeriksaan rutin lansia dan bantuan obat-obatan
 - e. Pembinaan/penyuluhan kesehatan
 - f. Pembangunan MCK dan air bersih
 - g. Pengadaan jamkesmas dan jamkesda
 - h. Pembangunan pagar Pustu
 - i. Pengadaan Penyuluhan terhadap narkoba
 - j. Memberdayakan senam jantung sehat
 - k. Pengadaan ambulan nagari
 - l. Pengadaan pansimas
 - m. Pengadaan Ambulance Nagari
 - n. PMT
- dst

4. Sub Bidang Perekonomian Nagari

Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganeekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

Prioritas Kegiatan

- a. Berkembangnya komoditas Petani, Perikanan, dan Peternakan serta tanaman pangan yang cocok dengan budaya masyarakat.
 - b. Terciptanya wisata Nagari.
 - c. Menumbuh kembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan perekonomian Nagari
- dst



5. Sub Bidang Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

Prioritas Kegiatan

- a. Pengelolaan Hutan Milik Nagari
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari
- c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang lingkungan Hidup dan Kehutanan dst

6. Bidang Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Prioritas Kegiatan

- a) Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang kuat, Transparan, Bersih dan Bertanggung Jawab (Akomodatif, Partisipatif dan Komentatif).
- b) Tertatanya Kelembagaan Nagari, Pemerintahan Nagari dan Lembaga lainnya.
- c) Terciptanya Pemerintahan Nagari yang mampu melaksanakan kewenangannya dan urusan yang dimiliki Nagari.
- d) Berkembangnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat Nagari.
- e) Terwujudnya Masyarakat Nagari yang aman, Tertip dan Tentram.
- f) Memberikan kemudahan dalam Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat.

1. Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari



2. Uang kehormatan BAMUS Nagari
 3. Biaya operasional dan perjalanan dinas
 4. ATK dan inventaris kantor Wali Nagari
 5. Belanja barang dan jasa
 6. Bantuan untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan
 7. Bantuan Pembangunan Partisipatif untuk kegiatan pembangunan fisik
- dst

7. Sub Bidang Sosial budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif.
 - b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral.
 - c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari.
 - d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.
 - e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah
- Prioritas Kegiatan :

- a. Pengadaan alat-alat kesenian
- b. Penyuluhan masalah adat
- c. Pengadaan olah raga
- d. Pengadaan pakaian adat Minangkabau
- e. pengadaan sanggar seni
- f. pakaian K3
- g. pakaian Pemaku Adat/Rang tua adat
- h. pakaian yandu
- i. pengadaan Gendang
- j. pakai seragam gandang tasa
- k. lapangan bola kaki
- l. lapangan takraw



- m. pakaian seragam olah raga
- n. alat kesenian
- o. Sarunai
- p. Rabana
- q. Pakaian anggota sanggar
- r. Tonggang gawang
- dst



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kondisi Nagari, Potensi dan Masalah. Serta daftar Revisi RPJMNag 2019 s/d 2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai Visi dan Misi Nagari.
2. Dibutuhkan perhatian lebih dalam Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangunan Nagari.
3. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan Nagari.
4. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan Pembangunan Nagari.
5. Keberhasilan Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari.

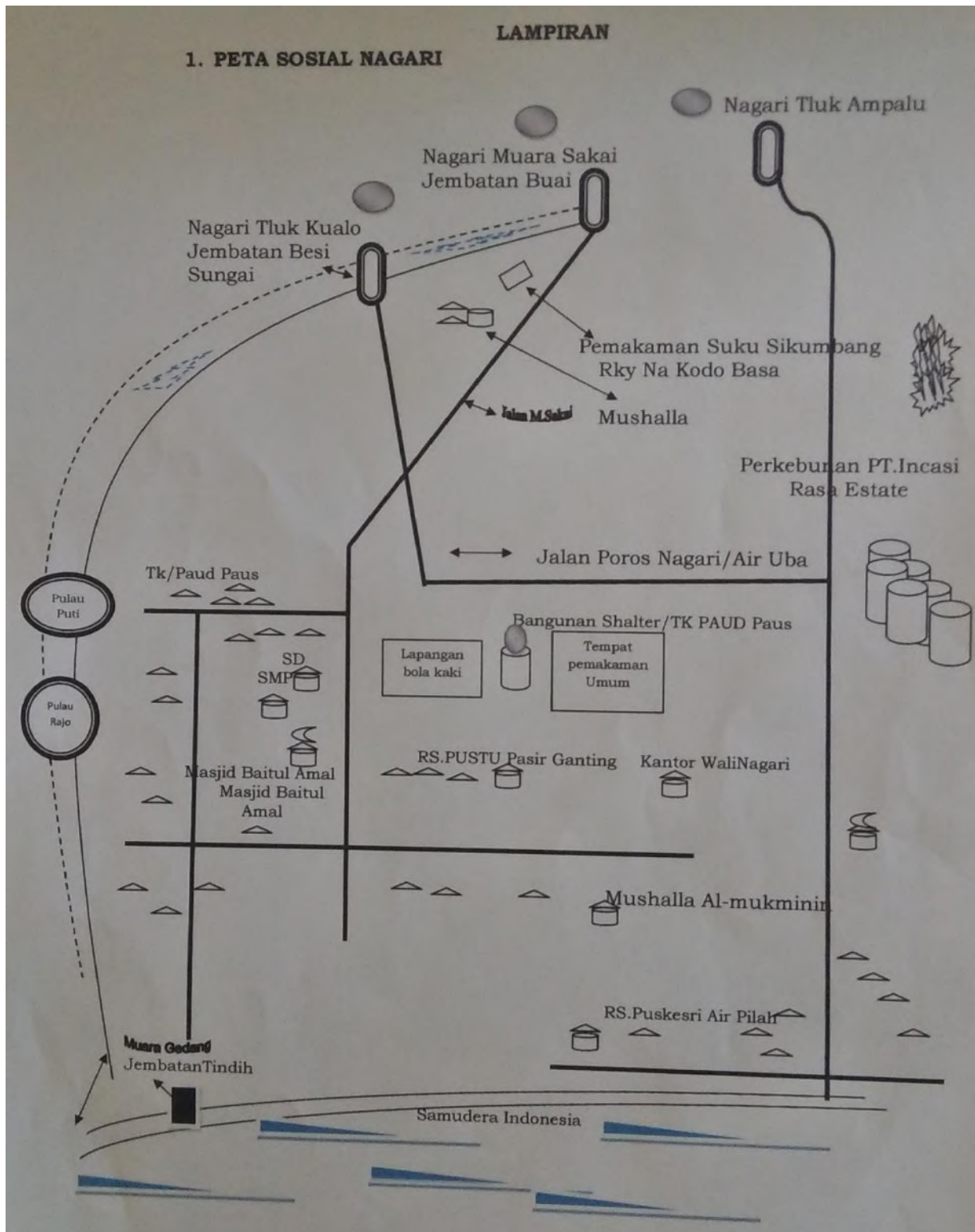
5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa Saran yang perlu disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan yang diakui di Nagari, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama periode 2019 s/d 2023. Yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag).



Lampiran 1. Peta Sosial Nagari Pulau Rajo Inderapura





TABEL (MATRIK) PROGRAM/KEGIATAN LIMA TAHUN

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nag)

TAHUN 2019 s/d 2023

NAGARI : PULAU RAJO INDERAPURA

KECAMATAN : AIRPURA

KAB/KOTA : PESISIR SELATAN

PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Barang Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan			2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerjasama antar Desa	Kerja Pihak Ketiga



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

a	b	c	d	E	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyelenggaraan PemDes	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa	P.Rajo	11 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	633.600.000	ADD	v		
				tunjangan wali nagari dan perangkat	P.Rajo	11 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	118.800.000	ADD	v		
				tunjangan kehormatan bamus	P.Rajo	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	198.000.000	ADD	v		
				tunjangan perogram JKKK dan purnbakti wali nagari	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	21.600.000	ADD	v		
				Insentif Kepala Desa	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	72.000.000	Prov	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			Pengadaan Kartu Jaminan Kesehatan dan Jaminan Tenaga Kerjaan	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	100.000.00	DD	v		
		Kegiatan Nagari	Honorarium Guru Mengaji	Desa	6 Paket	Guru	v	v	v	v	v	54.000.000	ADD	v		
			Honorarium Kader Yandu & PMT	P.Rajo	2 Paket	Tim	v	v	v	v	v	21.600.000	ADD	v		
			Honorarium pemungutan PBB	P.Rajo	2 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	12.000.000	ADD	v		
			Honorarium Kader Sub PPKBD,Kader PPKBD dan KPMN	P.Rajo	6 Paket	Kader	v	v	v	v	v	24.000.000	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			honorarium Kader Dasa wisma	P.Rajo	12 Paket	Tim	v	v	v	v	v	12.000.00 0	ADD	v		
		b	Lembaga	Operasional perkantoran	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	165.000.0 00	ADD	v		
				Operasional bamus nagari	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	45.000.00 0	ADD	v		
				Operasional pemungutan PBB	P.Rajo	2 Paket	Pemdes	v	v	v	v	9.000.000	ADD	v		
				operasional raskin	P.Rajo	2 Paket	Pemdes	v	v	v	v	48.000.00 0	ADD	v		
				Operasional PKK	P.Rajo	6 Paket	PKK	v	v	v	v	48.000.00 0	ADD	v		
				Operasional Linmas nagari	P.Rajo	1 Paket	Tim	v	v	v	v	60.000.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

													0				
		c	Informasi Desa	Profil Desa Online	P.Rajo	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	36.000.00 0	ADD	v		
				Kunker/Study Banding	Luar Desa	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	50.000.00 0	ADD	v		
				Pelatihan Wabesite Sinar Desa	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	40.000.00 0	DD	v		
				Pelatihan Siskuedes	P.Rajo	1 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	50.000.00 0	DD	v		
		d	Perencana an Desa	Penyusunan RPJMDes	P.Rajo	1 Paket	Tim	v					6.085.292	ADD	v		
				Penyusunan RKPDDes	P.Rajo	6 Paket	Tim	v	v	v	v	v	18.000.00 0	ADD	v		
				Penyusunan	P.Rajo	5 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	56.250.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				RAB									0				
				pengelolaan aset nagari	P.Rajo	6 Paket	Pemdes	v	v	v	v	v	18.000.000	ADD	v		
		e	Sarana dan Prasarana	Penerangan /Lampu Jalan	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	30.000.000	ADD	v		
				Mic,Toa dan Amplier	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	15.000.000	ADD	v		
				Instalasi Listrik Kantor Desa	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat					v	2.000.000	ADD	v		
				Komputer Kantor Desa	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	20.000.000	ADD	v		
				Pemilihan bamus nagari	P.Rajo	1 Paket	Pemdes		v	v	v	v	3.750.000	ADD	v		
				Meja ½ biro	P.Rajo	2 Paket	Masyara		v	v	v	v	10.000.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

							kat						0				
				Laptop & Printer	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	18.000.00 0	ADD	v		
				Kamera Digital	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	9.500.000	ADD	v		
				Data,Struktur dan Profil	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	5.000.000	ADD	v		
				Filing Kabinet	P.Rajo	2 Unit	Pemdes			v	v	v	10.000.00 0	ADD	v		
				Kursi Tamu Stailis	P.Rajo	2 Unit	Masyara kat	v	v	v	v	v	10.000.00 0	ADD	v		
				Kulkas Kantor Desa	P.Rajo	1 Unit	Masyara kat			v	v	v	5.000.000	ADD	v		
				Infokus Kantor Desa	P.Rajo	I Set	Masyara kat		v	v	v	v	10.000.00 0	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			Mesin Potong Rumput	P.Rajo	4 Unit	Masyarakat		v	v	v	v	7.000.000	ADD	v		
			Kursi Futura	P.Rajo	10 Unit	Masyarakat		v	v	v	v	5.000.000	ADD	v		
			Meja Paten Pelayanan	P.Rajo	1 Paket	Pemdes			v	v	v	50.000.000	DD	v		
			Mesin Giling / Pakan	P.Rajo	1 Paket	Pemdes		v	v	v	v	2.000.000	APBD	v		
			Kendaraan Dinas	P.Rajo	3 Unit	Pemdes	v	v	v	v	v	50.000.000	DD	v		
			Tiang Lampu Jalan	P.Rajo	4 Tiang	Masyarakat		v	V	v	v	10.000.000	ADD	v		
			Marawa/Umbul-umbul	P.Rajo	100 lbr	Masyarakat		v	v	v	v	15.000.000	ADD	v		
			Gorden Kantor	P.Rajo	1 Paket	Pemdes			v	v	v		ADD	v		

Revisi RPJMNag Pulau Rajo Inderapura Tahun 2019 s/d 2023



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

2	Pembangunan Desa	a	Infrastruktur Desa	pembangunan parit miring / pengeringan rawa	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	500,000,000	DD	v		
				pembangunan jembatan plat beton Nagari	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	200,000,000	DD	v		
				pengerasan dan penimbunan badan nagari	P.Rajo	3 Paket	Masyarakat	v	v	v		v	750,000,000	DD	v		
				pelebaran Jalan	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	400,000,000	DD	v		
				pembangunan Plat beton nagari	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	120,000,000	DD	v		
				pembangunan pos jaga pemuda	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	10,000,000	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pembangunan rabat beton nagari	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	400,000,000	DD	v		
				pematangan lahan lokasi rumah tapak	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	81,640,000	APBD Kab			v
				pembangunan kolam nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	100,000,000	dd	v		
				pembangunan pagar shalter dan terali complit	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	250,000,000	DD	v		
				pembangunan pagar SD	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	50,000,000	DD	v		
				pembangunan pagar nagari	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	300,000,000	DD	v		
				pembangunan	P.Rajo	2 Paket	Masyara	v	v	v	v	v		APBD			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			MCK nagari			kat						250,000,000	Kab			
			Pembukaan jalan baru 25 km	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	800,000,000	DD	v		
			Pengadaan dan pemeliharaan EWS Nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	100,000,000	DD	v		
			pembangunan pengaman tanggul sepanjang bibir pantai	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	5,000,000,000	APBD			v
			pembangunan gedung shalter kampung air pilah	P.Rajo	2 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	1,000,000,000	APBN			v
			pembangunan tempat pelelangan	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	3,000,000,000	APBN			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				ikan													
				pembangunan pentas pantai	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	2,000,000 ,000	APBN			v
				pembangunan pagar lapangan bola kaki	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	60,000,00 0	DD	v		
				pembukaan muara baru	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	150,000,0 00	DD	v		
				pembangunan jembatan nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	2,000,000 ,000	APBN			v
				pembangunan /pembukaan jl pariwisata nagari	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	300,000,0 00	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			pembangunan perbaikan jembatan	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	2,000,000,000	APBN			v
			pengaspalan jln nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	900,000,000	APBD			v
			pembangunan tribun mini lapangan bola kaki	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	1,000,000,000	APBN			v
			pembangunan rumah dinas guru	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	100,000,000	DD	v		
			pembangunan dan pengadaan perpustakaan Nagari	P.Rajo	1 Paket	Guru		v	v	v	v	300,000,000	APBD Kab			v
			pembangunan gedung SD	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	250,000,000	APBD Kab			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				jarak jauh									00				
				pengadaan lapangan bola kaki nagari	P.Rajo	1 Paket	Murid	V	v	v	v	v	800,000,000	APBN			v
				Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	P.Rajo	1 Paket	Pemuda		v	v	v	v	200,000,000	DD	v		
				pembukaan jl kemuara gedang	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	80,000,000	DD	v		
				pembukaan penggalian muara baru	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	2,000,000,000	APBN			v
				pembangunan gedung paud Terintegrasasi nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v		1,000,000,000	APBN			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pembangunan rumah tidak layak huni nagari	P.Rajo	2 Paket	Murid	V	v	v	v	v	300,000,000	DD	v		
				pembangunan balai pemuda'	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	300,000,000	DD	v		
				pembangunan rumah panggung	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	60,000,000	DD	v		
				pembangunan tanggul pantai	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	1,000,000,000	APBN			v
				pembangunan dermaga mini	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	2,000,000,000	APBN			v
				pengadaan kendaraan dinas nagari	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	1,500,000,000	APBN			v
				Pembangunan Irigasi	P.Rajo	3 unit	Masyara kat	v	v	v	v	v	100,000,000	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

												00				
				jembatan jl.usaha tani	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	500,000,0 00	dd	v	
				penambahan rabat beton	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	200,000,0 00	DD	v	
		b	Kesehatan Desa	pengadaan Ambulan Nagari	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	800,000,0 00	DD	v	
				Peralatan dan pemeliharaan Poskesri dan pustu	P.Rajo	1 Unit	Masyara kat	V	v	v	v	v	200,000,0 00	APBD Kab		v
				pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat			v	v	v	90,000,00 0	DD	v	
				pemeriksaan rutin lansia	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	150,000,0	APBD Kab		v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			gratis dan obat-obatan									00					
			pembersihan sungai	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	ADD	v			
			pengadaan Pongging nyamuk	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	100,000,0 00	ADD	v			
			pengadaan penyuluhan narkotika	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	70,000,00 0	DD	v			
			Pembangunan dan pemeiliharaan PAMSIMAS /Air Bersih	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	1,500,000 ,000	APBD				v
			pemberdayaan senam jantung sehat	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	ADD	v			
			pengadaan	P.Rajo	2 Paket	Masyara	v	v	v	v	v		ADD	v			



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pansimas			kat						50,000,00 0				
				PMT	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	300,000,0 00	APBD Kab			v
				Mck Puskesri dan masyarakat	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	21,600,00 0	ADD	v		
		c	Pendidika n Desa	Operasional TK/PAUD	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v			75,000,00 0	DD	v		
				Honorarium Guru TK/PAUD	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat			v	v	v	15,000,00 0	ADD	v		
				pengadaan les sore	P.Rajo	6 Paket	Guru	V	v	v	v	v	64,800,00 0	ADD	v		
				pengadaan beasiswa	P.Rajo	1 Paket	Murid	V	v	v	v	v	50,000,00 0	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pembinaan guru terhadap penting kedisiplinan	P.Rajo	1 Paket	Murid	V	v	v	v	v	50,000,000	ADD	v		
				pengadaan mobil sekolah	P.Rajo	1 Paket	Guru	V	v	v	v	v	25,000,000	ADD	v		
				pengadaan alat permainan paud	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	30,000,000	APBD Kab			v
				pengadaan alat kesenian SLTP	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,000	DD	v		
				pengadaan mobil sekolah	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,000	DD	v		
				pengadaan alat permainan	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	30,000,000	APBD Kab			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				paud													
				pengadaan alat kesenian SLTP	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		
				pengadaan mobiler SDN02	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		
				pengadaan mobil sekolah	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		
				pemberdayaan para serjana	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	30,000,00 0	APBD Kab			v
				Pengadaan Tempat Edukatif TK/PAUD	P.Rajo	1 Paket	Pelajar		v	v	v	v	100,000,0 00	DD	v		
				Pengadaan pagar TK/PAUD	p.Rajo	1 paket	Anak- anak	V	v	v	v	v	300.000.0 00	DD	V		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

		d	Ekonomi Desa	pengadaan bibit ikan nagari	P.Rajo	10 org	guru	V	v	v	v	v	25,000,00 0	ADD	V		
				pengadaan pohon klingking	P.Rajo	5 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	900,000,0 00	ADD	V		
				pengadaan ternak nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			v	v	v	450,000,0 00	ADD	V		
				integritas kebun ternak	P.Rajo	4 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	200,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan bibit pertanian nagari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	75,000,00 0	DD	V		
				pengadaan alat pengolahan ikan	P.Rajo	5 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	500,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan	P.Rajo	1 Paket	Masyara	v	v	v	v	v		APBD			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			tambak udang			kat						700,000,000	Kab			
			pengadaan mesin yamaha tempe 15 pk	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	50,000,000	DD	V		
			pengadaan alat memasak PKK	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	500,000,000	APBD Prov			v
			pengadaan thermokking ikan	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	50,000,000	ADD	V		
			pengadaan kapal canggih nelayan	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	200,000,000	APBD Prov			v
			pengadaan kapal pemburu pukat lempira dasar/pukat katrol (pukat	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	350,000,000	APBD Prov			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				harimau)													
				normalisasi sungai	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	400,000,000	APBD Prov			v
				pengadaan ikan larangan	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	100,000,000	DD	V		
				pelestarian hutan tanaman rakyat	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	220,000,000	DD	V		
				pengadaan sapi potong	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,000	DD	V		
				pengadaan kapur tani	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	70,000,000	APBD Kab			v
				pengadaan perikanan air tawar	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	40,000,000	ADD	V		
				Pengadaan Tempat pelelangan	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat			v	v	v	7,000,000,000	APBD			v



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				Ikan													
				pengadaan viber dan para para	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	150,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan jarring	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	200,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan pemasaran ikan	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	170,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan pengelohan ikan	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	300,000,0 00	APBD Kab			
				pengadaan alat permainan paud	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	300,000,0 00	APBD Kab			v
				pengadaan alat kesenian SLTP	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pengadaan mobiler SDN02	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		
				pengadaan lampu jalan	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0	DD	v		
				pengadaan kerambah apung	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	40,000,00 0	DD	v		
				pengadaan lapangan bola kaki Baru	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	100,000,0 00	DD	v		
				Penanaman 1000 btg sawit sepanjang jalan utama	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	70,000,00 0	DD	v		
				Pengadaan dan Pemeliharaan mesin penggiling/pal	P.Rajo	1 Paket	Ibu PKK	v			v	v	100.000.0 00	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				et													
		e	Pemeliharaan	Rehab Drainase	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	35,000,000	Pihak ketiga			v
				Rehab Jalan	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	950,000,000	DD			v
				rehab pustu tahap 2	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat			v	v	v	950,000,000	DD			
				rehab poskesri thp 2	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	200,000,000	APBD Kab			v
				pengadaan mobiler TPA	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	45,000,000	DD	v		
				perawatan gedung shalter	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat		v	v	v	v	15,000,000	ADD	v		
				penanaman pohon aru	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v	v	50,000,000	ADD	v		
				Rehab gedung TK/PAUD	P.Rajo	1 Paket	Masyarakat	V	v	v	v		60,000,000	DD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

					P.Rajo	1 Unit	Masyara kat	V					900,000,0 00	ADD	v		
	Jumlah Perbidan g 2												52.268,0 40,000				
3	Pembinaa n Kemasyar akatan	a	Pembinaa n Kesenian	mobiler kesenian nagari	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat			v	v	v	15,000,00 0.00	APBN			v
				pakaian seragam sanggar	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	10,000,00 0.00	ADD	v		
				pengadaan sanggar seni	P.Rajo	2 kelp	Masyara kat	V	v	v	v	v	9,000,000 .00	ADD	v		
				pengadaan tonggak gawang	P.Rajo	2 paket	pemuda	V	v	v	v	v	15,000,00 0.00	ADD	v		
		b	Pembinaa n Adat	Pelatihan Bicara Adat	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat			v	v	v	15,000,00 0.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				pembinaan RT Kauman salapan	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	50,000,00 0.00	ADD	v		
		c	Pembinaa n Agama	pembinaan majlis taklim	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	36,000,00 0.00	ADD	v		
				kegiatan tim safari	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	30,000,00 0.00	ADD	v		
				kegiatan PHBI dan PHBN	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	42,000,00 0.00	ADD	v		
			kesehatan	pemb kader yandu	P.Rajo	2 paket	Masyara kat	V	v	v	v	v	70,000,00 0.00	ADD	v		
		e	Pembinaa n Ketertiban	Pelatihan Siskamling	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			v			10,000,00 0.00	ADD	v		
				kegiatan keamanan ketertiban (linmas)	P.Rajo	1 Paket	Tim	V	v	v	v	v	12,000,00 0.00	ADD	v		
		f	Pembinaa n	Pelatihan	P.Rajo	1 Paket	Masyara		v	V	v	v	10,000,00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			Ekonomi	Mejahit			kat						0.00				
				pel. pertanian & perikanan	P.Rajo	2 paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	60,000,00 0.00	ADD	v		
				Pelatihan Membuat Kue	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			v	v	v	10,000,00 0.00	ADD	v		
				pelatihan pemuda dalam olahraga	P.Rajo	2 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	30,000,00 0.00	ADD	v		
				pel.pengurus gapoktan,LKM A, bumrag & koperasi	P.Rajo	3 Paket	Tim	v	v	v	v		50,000,00 0.00	ADD	v		
				pelatihan nagari	P.Rajo	7 Paket	Tim	v	v	v	v	v	100,000,0 00.00	ADD	v		
	Jumlah Per Bidang 3												574,000,000.00				
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Sarana dan Prasarana	Gandang Tasa	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	V	v	v	4,691,422 .00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

	at	Kesenian															
				sarana TPA/MDA	P.Rajo	1 Paket	Anak- anak	v	v	v	v	v	50,000,00 0.00	ADD	v		
				Pakai Seragam Gandang Tasa	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			v			3,000,000 .00	ADD	v		
				Pengadaan Seragam Komplit	P.Rajo	10 Paket	Masyara kat			v	v	v	50,000,00 0.00	DD	v		
		b	Sarana dan Prasaran Olah Raga	Lapangan Bola Voli	P.Rajo	1 Paket	pemuda				v		50,000,00 0.00	ADD	v		
				sarana dan prasarana olah raga	P.Rajo	1 Paket	pemuda	v	v	v	v	v	100,000,0 00.00	ADD	v		
				Lapangan Takraw	P.Rajo	1 Paket	pemuda				v		25,000,00 0.00	ADD	v		
				Pakai Seragam Olah Raga	P.Rajo	1 Paket	pemuda		v	V	v	v	15,000,00 0.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			SSB	P.Rajo	3 Paket	pemuda			v	v	v	75,000,00 0.00	ADD	v		
			BBGRM	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	250,000,0 00.00	ADD	v		
			Senam jantung sehat	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	25,000,00 0.00	ADD	v		
		c	Pemberda yaan Ekonomi	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			v	v	v	30,000,00 0.00	ADD	v		
			Pelatihan tata boga	P.Rajo	2 Kamp	Masyara kat	v	v	v	v	v	35,000,00 0.00	ADD	v		
			Pel. teknologi tepat guna	P.Rajo	tim	Masyara kat	v	v	v	v	v	40,000,00 0.00	ADD	v		
			SP. Perempuan	P.Rajo	5 klpk	Masyara kat	v	v	v	v	v	80,000,00 0.00	ADD	v		
			Peralatan Kue	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	10,000,00 0.00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

		d	Sarana Prasarana Kegiatan Desa	Pakaian K 3	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	10,000,00 0.00	ADD	v		
				Pakaian Hulu Balang	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat			v	v	v	20,000,00 0.00	ADD	v		
				Pakaian Yandu	P.Rajo	3 Paket	Masyara kat		v	v	v	v	7,500,000 .00	ADD	v		
				pakaian seragam pkk	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v			30,000,00 0.00	ADD	v		
		e	Pemberda yaan Perangkat	Pelatihan Pemd	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	V	v	v	5,000,000 .00	ADD	v		
				Pelatihan BPD	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	V	v	v	10,000,00 0.00	ADD	v		
				Pelatihan LPM	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	V	v	v	5,000,000 .00	ADD	v		
				Pelatihan PKK	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	V	v	v	5,000,000 .00	ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

				Pelatihan Karang Taruna	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat			V	v	v	5,000,000 .00	ADD	v		
				Pelatihan TTG	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat	v	v	v	v	v	40,000,00 0.00	ADD	v		
				pelatihan computer	P.Rajo	1 Paket	Masyara kat		v	v	v		75,000,00 0.00	ADD	v		
	Jumlah Per Bidang 4												1,055,19 1,422.00				
5	Penanggul angan Bencana, Keadaan Darurat, Mendesak Nagari	a	Penanggul angan Bencana	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana	P.Rajo	1 Kali	Masyara kat		v				10,000,00 0.00	ADD	v		
			Keadaan Darurat	Pembuatan Dapur Lima	P.Rajo	1 Kali	Anak- anak		v	v	v	v	25,000,00 0.00	ADD	v		
				Pembuatan	P.Rajo	1 Kali	Masyara		v	v	v	v		ADD	v		



PEMERINTAH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

			Tenda Darurat			kat						25,000,00 0.00				
			Bantuan Logistik	P.Rajo	1 Kali	Masyara kat		v	v	v	v	25,000,00 0.00	DD	v		
		Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	P.Rajo	4 kali	Masyara kat		v	v	v	v	40,000,00 0.00	DD	v		
	Jumlah PerBidan g 5											125,000,000.00				

DIKETAHUI OLEH

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN,S,Pd



